



**AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNAG) NAGARI TALANG  
TANGAH KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH  
DATAR TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar saejana (S1) pada  
Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam*

**Oleh:**

**Dike Nastiti Wahyuni**  
**NIM: 1730403021**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2022 M/ 1443 H**

## ABSTRAK

**DIKE NASTITI WAHYUNI, NIM 1730403021**, dengan judul skripsi: **"Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBN) Nagari Talang Tengah Kecamatan Sungaiatarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020"**. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pemerintah Nagari Talang Tengah tidak membuat papan informasi mengenai kegiatan yang sedang berjalan dan laporan realisasi pelaksanaan APBNag belum dipublikasikan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil deskripsi dapat melalui pengukuran dengan membandingkan standar/kriteria akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas yang diterapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2020. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) di Nagari Talang Tengah sudah melaksanakan prinsip akuntabel. Dari sisi tranparansi, dalam hal pertanggungjawaban kepada bupati, menerima suara/usulan rakyat untuk pembangunan di Nagari sudah melaksanakan prinsip transparansi.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Dengan rahmat dan karunia-Nya itulah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBN) NAGARI TALANG TANGAH KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020”**

Selanjutnya shalawat beserta salam penulis mohon kan kepada Allah SWT semoga tercurahkan pada junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kendala yang menghambat langkah penulis. Berkat bantuan dari dan bimbingan dari semua pihak, terutama kedua orang tua, Ayah tercinta Nazarudin dan Ibu tercinta Rosmawati yang memberikan dorongan dan semangat dan doa yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada jurusan Akuntansi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Selain itu juga penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, Ms.c selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Ibu Yeni Melia, MM. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
4. Ibu Sri Adelia Fitri, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

5. Ibu Sri Adelia Fitri, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nita Fitria, SE.I., MA selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran terbaik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan wawasan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah, Staf Akama, Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
9. Bapak Wali Nagari Talang Tengah Andry Andres beserta Staf kantor wali nagari Talang Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Abang terhebat Nazti Arinanda dan Adik Tercinta rizaldi yang selalu mendukung dalam hal apapun makasih selalu ada buat kakak dalam kondisi apapun.
12. Sahabat terdekat (Aulia Rachmi, Yulanda Eka Putri, Sagita Febriani, Andini Jones, dan Jefry) terimakasih yang selalu menemani mulai dari Sekolah Dasar, mengenyam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, menepuh Sekolah Menengah Atas sampai saat ini dan selalu mendukung dan mensupport dalam kondisi apapun, telah sampai pada pembuatan skripsi ini masih tetap bersama dan saling menyemangati satu sama lain untuk memperoleh gelarnya masing-masing.
13. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017 lokal A yang selalu membantu dan menemani penulis serta memberikan semangat dalam susah dan senang selama masa perkuliahan berlangsung.

Terakhirnya penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satupersatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak,

*Amiin ya rabbal alamin.*

Batusangkar, 25 Agustus 2021

**DIKE NASTITI WAHYUNI**  
**NIM. 173043021**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Defenisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Landasan Teori .....	10
1. Pengertian Akuntabilitas .....	10
2. Transparansi .....	14
3. Pengelolaan .....	19
4. Anggaran .....	29
5. Pendapatan Nagari .....	36
6. Belanja Nagari .....	39
B. Kajian Relevan .....	39
C. Kerangka Pemikiran .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	48
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Analisis Data .....	50

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Nagari Talang Tengah .....	57
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan .....	61
1. Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah Tahun 2020 .....	61
2. Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah Tahun 2020 .....	67
3. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah Tahun 2020 .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Hasil penelitian yang relevan.....	39
Tabel 3.2 Standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi.....	55
Tabel 4.1 Luas Wilayah .....	60
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Nagari Talang Tengah .....	62
Tabel 4.3 Struktur BPRN Talang Tengah.....	63
Tabel 4.4 Jumlah penduduk nagari Talang Tengah .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	47
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia pada zaman era globalisasi merupakan bagian dari penduduk dunia dengan mempunyai kewajiban yang berlangsung secara terus menerus ikut terlibat dalam menciptakan pemerintah yang baik (*Good governance*) guna menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Untuk penyesuaian kondisi yang demikian oleh sebab itu pemerintah memberikan otonom kepada daerah seluas mungkin dengan tujuan menciptakan agar daerah dapat mengurus dan memerintah sistem pemerintahannya sendiri agar berguna dan berhasil dalam mengatur dan mengurus sistem pemerintahan dalam pembangunan maupun rangka pelayanan kepada masyarakat (Marchelino, 2013).

Pembangunan nasional merupakan tujuan negara Indonesia demi menciptakan keinginan bersamanya secara benar, yaitu dengan menciptakan warga yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Saat ini pemerintah telah giat dalam membangun segala bidang untuk menciptakan bangsa dan Negara, baik dalam bidang materill serta spiritual. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Indonesia mengisyaratkan adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi, kabupaten/kota, desa merupakan bagian daerah otonom mulai dari tingkat tertinggi sampai terbawah yang memiliki kuasa untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. (Andy, Endang, dan Zahroh, 2015, p. 2).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Di sektor material, pemerintah telah mengembangkan berbagai perbaikan untuk membangun Fasilitas fisik tepat sasaran, fasilitas yang berkaitan dengan sektor

material ini dapat tercermin dari adanya perkembangan ekonomi (Andy, Endang, dan Zahroh, 2015, p. 2).

Pelaksanaan otonomi daerah ini sangat membutuhkan dukungan dan pengembangan sistem manajemen pembangunan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat luas. Dalam tatanan dan struktur pemerintahan sangat diperlukan dan terselenggaranya perilaku dan tindakan pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis (*good governance*). Sementara itu, struktur dan struktur sosial harus diperluas untuk menggambarkan peluang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Daerah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Salah satu tindakan rasional yang perlu dilaksanakan oleh otonomi daerah adalah meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten. Otonomi daerah merupakan suatu konsep kajian nyata yang memberikan porsi yang lebih besar bagi daerah dengan menyalurkan segala urusan dan kebutuhan daerah agar dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. (Pratikno, 2000).

Desa atau Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU). Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kata desa atau nagari sering berarti masyarakatnya miskin, tradisional, dan kolot, namun sebenarnya desa memiliki kelurahan dan kearifan lokal yang luar biasa. Nagari adalah pelopor sistem demokrasi yang sepenuhnya otonom dan berdaulat. Sejak lama, desa memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma-norma sosialnya sendiri. Hingga saat ini pembangunan nagari masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. (Anisa, 2017, hal. 274)

Menurut kajian politik, nagari dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan khusus dalam struktur pemerintahan negara. Diskusi politik juga memiliki tradisi membahas nagari dalam hal otonomi dan demokrasi. Pembicaraan tentang nagari sebagai komunitas otonom melahirkan sejumlah gagasan tentang tipe nagari seperti komunitas yang berpemerintahan sendiri (self-governing), pemerintahan sendiri lokal (state government di tingkat lokal). Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi tentang kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak yang membutuhkan. Namun, tak sedikit pula yang khawatir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dianggap sebagai kebijakan politik belaka yang justru akan menjerat aparat nagari. Banyak pihak yang beranggapan bahwa kapasitas aparat nagari di daerah masih rendah dan belum siap, dikhawatirkan akan menyeret mereka ke pengadilan. Dari sisi pengelolaan keuangan desa, akan terdapat risiko kesalahan baik administratif maupun substantif yang dapat menimbulkan permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi wali nagari dan aparatur nagari dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari. Hal ini terjadi karena pemerintah nagari yang akan menerima dana program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) memiliki konsekuensi harus mampu mengelolanya secara akuntabel, transparan dan bebas dari penyalahgunaan. Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak untuk mengetahui secara terbuka dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Mahmudi, 2015, p. 9).

Nagari Talang Tangah merupakan salah satu Nagari yang menerima penerimaan anggaran dari pemerintah yang bersumber dari APBN dan

APBD. Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) dalam Pengelolaan Keuangan Talang Tengah Nagari dimulai dari; perencanaan, yaitu penyusunan Kegiatan Pemerintahan Nagari (RKPNag) oleh perangkat desa dan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musremabang) untuk merumuskan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran; pelaksanaan, yaitu Nagari Wali membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau dengan menunjuk salah satu perangkat nagari yang bertanggung jawab atas setiap bidang pelaksanaan kegiatan dan dalam hal ini lingkungan masyarakat merupakan TPK utama; administrasi yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaporkan laporan realisasi penggunaan dana kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKNag), dalam hal ini bendahara nagari; pelaporan yaitu Wali Nagari Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati per semester yang disampaikan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD); akuntabilitas, yaitu Walikota Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

Akuntabilitas sebagai alat pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diberikan pemerintah daerah. Seperti halnya Nagari Talang Tengah yang memperoleh Alokasi Dana Nagari dari pemerintah daerah, maka aparata Nagari Talang Tengah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan dana tersebut. Nagari TalangTengah merupakan sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan Sungaitarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Nagari Talang Tengah belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada masyarakat secara tertulis. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada bab V pasal 40 ayat 1 dan 2 bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran harus dipublikasikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antarlain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) nagari Talang Tengah tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara survei awal dengan sekretaris Nagari Talang Tengah dengan mengajukan pertanyaan awal secara umum yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dan belanja nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah yang dilakukan pada tanggal Kamis 20 Desember 2022, bahwa: “dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah nagari (LPPN) Nagari Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020 yang dilaporkan kepada bupati dan LKPD kepada BPRN kami sudah menyusun anggaran dan realisasi dana atau sesuai dengan dasar hukum yang melandasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah nagari, dimana laporan tersebut siap untuk dipertanggungjawabkan. Tetapi yang dipaparkan kepada masyarakat hanya berupa dana anggaran pendapatan dan belanja dalam satu tahun, dan yang direalisasikan hanya secara umum saja. Akan tetapi untuk saat ini belum ada spanduk atau baliho yang dibuatkan sama dengan tahun sebelumnya untuk anggaran tersebut dikarenakan kondisi perpindahan gedung kantor wali nagari, dimana sebelumnya kami menggunakan kantor KAN untuk dijadikan kantor wali nagari, dan saat ini kami masih menggunakan Sekolah Taman Kanak-kanak untuk kami jadikan Kantor Wali Nagari” (Zulbaidar, Senin pukul 09.00 Wib tanggal 20 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Nagari Talang Tengah mengenai gambaran umum Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Untuk pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi pertanggungjawaban tersebut bisa saja diragukan karena kurang mendukungnya transparansi terhadap pertanggungjawaban tersebut karena tidak adanya spanduk atau baliho mengenai informasi anggaran pendapatan dan belanjanya. Hal tersebut terjadi bisa saja dikarenakan kurang memadai tempat atau mungkin saja tidak adanya tersedia tempat untuk khusus tempat baliho atau spanduk tersebut diletakkan.

Berdasarkan gambaran di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas yang diterapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2020. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam yang berjudul “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) Nagari Talang Tengah Tahun 2020*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka penulis mengambil fokus pada penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020.
2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020.
3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini hanya terbatas kepada Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah Tahun 2020.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020 ?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020 ?

3. Bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui tranparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah Tahun 2020.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada analisis pengelolaan APBNag, tranparansi dan akuntabilotas dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teori.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pihak Kenagarian

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat Nagari dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja Nagari sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah Nagari yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Nagari dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari sehingga dapat menyelenggarakan pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.



b. Bagi Pembaca

Bahan bacaan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag), serta untuk menambah wawasan pembaca sehingga juga dapat dijadikan acuan bagi pembaca untuk peneliti selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) serta untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Srajana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **G. Defenisi Operasional**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan perilaku seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari, pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Nagari adalah kepada Bupati dan Masyarakat. Dan juga tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Asas akuntabilitas adalah suatu kondisi di mana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara administratif maupun politik. Baik dalam hal pembuatan kebijakan, implementasi hingga pelaporan suatu kebijakan. (Santoso, 2008, hal. 15)

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik dan kemudahan dalam memberikan informasi yang akurat dan memadai kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Transparansi keuangan

adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan tuntas tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Ngakil, 2020, hal. 95)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan nagari dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran serta dikelola dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. ) tahun fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Talang Tengah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan istilah yang erat kaitannya dengan akuntansi dan manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau suatu keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Akuntabilitas merupakan prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan kewajibannya, prinsip ini harus dipegang teguh oleh perusahaan agar setiap karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tujuan bisnis mudah tercapai. Demikian juga dalam sebuah desa atau nagari, pegawai atau pejabat nagari, prinsip dan tujuan juga harus dipegang erat oleh masyarakat. (Juliana, 2017, hal. 176)

Menurut Lowton dan Rose, akuntabilitas adalah konsep etis yang berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan keputusan yang dibuat dengan aktivitas yang dilakukan. Dalam akuntansi, konsep akuntabilitas harus dipisahkan dari istilah pertanggungjawaban karena memiliki perbedaan. Akuntabilitas berarti proses ketika seseorang atau organisasi melaporkan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, akuntabilitas juga merupakan instrumen akuntabilitas atas dasar keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pengendalian tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
- b. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
- e. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inofatif.

Akuntabilitas terdiri dari beberapa jenis tergantung konteks yang sedang di pakai. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah sebuah kondisi dimana seseorang mampu mempertanggung jawabkan keputusan yang dia ambil kepada jabatan otoritas di atasnya. Misalnya saja akuntabilitas kepala desa kepada camat, dan seterusnya keatas sampai pada menteri dan presiden.

b. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan. Tanggung jawab disini biasanya berhubungan erat dengan penyelesaian tugas pada pelayanan publik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu isu kebijakan strategis di Indonesia saat ini karena peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya menciptakan *good governance*. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan di bidang politik, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Agus Dwiyanto,2002).

Menurut Theft Act 1968, salah satu jenis praktik curang adalah korupsi (Jones, 1990). Praktik korupsi dalam pemerintahan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia Tenggara dan dunia. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di

Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya maraknya praktik kecurangan yang terjadi di berbagai instansi pemerintah.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan berimplikasi pada minimnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, maupun di nagari atau di desa. (Sari, 2015, hal. 144)

Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta informasi atau akuntabilitas. Berdasarkan pengertian di atas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat dan di daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing harus memahami ruang lingkup pertanggungjawabannya masing-masing, karena pertanggungjawaban yang diperlukan meliputi berhasil dan tidaknya pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Ledvina V. Carmo (Ledvina, 1991) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan evolusi dari kegiatan yang dilakukan oleh seorang pejabat, baik yang masih dalam batas wewenangnya maupun jauh di luar tanggung jawab dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sedangkan dalam menyusun sebuah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus berdasar pada indikator-indikator tertentu. Indikator kinerja menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberi gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

- 1) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundangundangan dan sebagainya.
- 2) Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
- 3) Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- 4) Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik bersifat positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

## 2. Transparansi

Saat ini transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi. Namun, ada satu pertanyaan, mengapa transparansi dalam Good Governance dibutuhkan? Sebelum kita mencoba mencari format dan konsep transparansi, mungkin pertanyaan di atas perlu dijawab terlebih dahulu. (Hanifa, 2015, hal. 7)

Ketika seseorang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, ia akan menawarkan seperangkat janji kepada pemilih, begitu pula kepala desa atau nagari juga memberikan serangkaian janji kepada masyarakat. Selanjutnya setelah mereka terpilih sebelum menjalankan tugasnya mereka akan disumpah. Ini semua adalah serangkaian janji yang harus dipenuhi kepada pemilih atau diri sendiri. (Hanifa, 2015, hal. 7)

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan saat ini adalah amanah yang diperintahkan kepada pemerintah sebagai output. Intinya di sini adalah mereka yang diperintahkan untuk percaya pada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan ini muncul karena pemerintah mampu dan mau memenuhi janji yang telah dibuat. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau komitmen kepada orang lain atau diri sendiri merupakan tanggung jawab. Jadi pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya. (Hanifa, 2015, hal. 7)

Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah kepada warganya adalah dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Selain itu, melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat memberikan umpan balik atau outcome atas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. (Rizal, 2018, hal. 31)

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan perangkat desa atau nagari dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban perangkat Nagari kepada masyarakat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan perangkat Nagari yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi secara harfiah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara keseluruhan (mampu dilihat melalui). Jadi, transparansi adalah keterbukaan dalam menjalankan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan *good governance*. Dengan adanya transparansi dalam setiap kebijakan dan keputusan dalam organisasi dan pemerintahan serta perangkat Nagari, keadilan dapat ditumbuhkan. (Rizal, 2018, hal. 32)

Dengan demikian, transparansi berarti keterbukaan aparatur Nagari dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Aparatur Nagari wajib memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. (Rizal, 2018, hal. 32)

Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Salah satu permasalahan di penghujung masa Orde Baru adalah merebaknya kasus korupsi. Korupsi sebagai tindakan yang harus dihindari dalam upaya mencapai cita-cita pemerintahan yang baik. Dan salah satu hal yang dapat memunculkan dan memberi ruang bagi kegiatan ini adalah pengelolaan pemerintahan yang tidak transparan.

Lebih lanjut Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa transparansi dapat diketahui oleh banyak pihak (berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak mengizinkan pengelolaan pemerintahan yang tertutup.



Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai berikut :

- a. Penetapan posisi jabatan atau kedudukan
- b. Kekayaan pejabat publik
- c. Pemberian penghargaan
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
- e. Kesehatan
- f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik
- g. Keamanan dan ketertiban
- h. Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat

Konsep transparansi menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*: *As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or 'civil society groups', as well as to increasingly well educated and diverse populations (2004 :66)*

Menurutnya, konsep *transparansi* merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama kegiatan pemerintah harus diyakini didasarkan pada transparansi. Ada kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Intinya ada hubungannya dengan percepatan dan pengaruh organisasi swasta, karena populasi terus meningkat. Artinya, tuntutan publik akan transparansi semakin kuat.

Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

- a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

- b. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat
- c. *Appeal rights (Permohonan Izin)*, adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Hidayat (2007:23), berpendapat bahwa transparansi berarti publik harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum, akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa dukungan transparansi dan kejelasan aturan hukum.

Dalam *Good Governance* (Nugroho, Randi R.W 2004: 128), transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Artinya transparansi disini adalah segala keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga pemahaman bahwa informasi tersedia secara gratis dan dapat diakses dengan mudah dan langsung. Sementara itu dalam <http://www.transparansi.or.id> Jurnal Masyarakat Transparansi menyatakan bahwa transparansi dibangun di atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga dan aparatur Nagari. Informasi harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dipantau.

Dari berbagai definisi transparansi di atas, jelas terlihat adanya benang merah antara transparansi dan good governance, dimana suatu perangkat Nagari dikategorikan *Good Governance* apabila pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Hal ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip *Good Governance* meliputi: Transparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung Jawab dan Partisipasi.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi bukanlah hal baru dalam konsep kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Nagari. Ketika setiap program kegiatan dikomunikasikan

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan konsisten melaksanakannya secara terbuka dan membangun kekompakan antara pimpinan dan bawahan serta mengharapkan masukan sebagai partisipasi dari masyarakat, maka prinsip transparansi sebenarnya telah dilaksanakan dengan baik.

Saat ini konsep atau ajaran pemerintahan nagari bersih yang bebas korupsi dan korupsi sedang dikembangkan dan disosialisasikan atau sedang dikembangkan pemerintahan aparat nagari yang bersih dan berwibawa. Ajaran tentang pemerintahan nagari yang baik dan bersih ini memang sangat populer dan menarik perhatian banyak orang dan dikenal dengan ajaran pemerintahan yang baik. Namun, pemerintahan aparatur Nagari yang bersih dan berwibawa sangat sulit diterapkan dalam praktik di lapangan. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang juga sedang mengembangkan tata pemerintahan yang baik, tidak menggunakan konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tetapi lebih memilih konsep pemerintahan yang bekerja lebih baik dan biaya lebih murah. Karena menurut mereka, konsep itu lebih mungkin diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kita semua pasti mendambakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam UU 32/2004 idealnya dapat mendorong terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semangat otonomi daerah menurut UU 32/2004 akan memacu terselenggaranya pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi.

Hal ini dapat terwujud karena daerah (kabupaten, kota, dan desa) memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan UU no. 32 Tahun 2004, daerah memiliki kewenangan yang luas dan lengkap. Dalam pengertian ini, daerah tidak lagi menunggu penyerahan kewenangan dari pusat tetapi dapat mengembangkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang sesuai dengan kondisi riil di daerahnya. Sedangkan utuh artinya dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak lagi ikut campur. Pemerintah pusat hanya memberikan pedoman, arahan, pedoman dan penetapan standar (Nurcholis, 2007:126).

Oleh karena itu, di sini perlu dirumuskan kembali pengertian “penyelenggaraan aparatur Nagari yang baik”. Yang dimaksud disini adalah; Pemerintahan aparatur nagari yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aparatur nagari yang diselenggarakan semata-mata untuk memenuhi aspirasi rakyat, atau pemerintahan aparatur nagari yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, menurut hemat kami, pertama-tama kita perlu menyatukan persepsi tentang tata kelola aparatur Nagari yang baik. Disini kami menawarkan good governance aparatur Nagari, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep otonomi daerah seharusnya mengubah atau mereformasi warna pemerintahan yang menekankan pada authority to governance yang menekankan pada interaksi antara pemerintah (publik), masyarakat (community) dan sektor swasta (profit and social).

### **3. Pengelolaan**

#### **a. Pengertian pengelolaan**

Pengelolaan adalah suatu proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum manajemen adalah suatu kegiatan

untuk mengubah sesuatu menjadi baik dan mempunyai nilai yang tinggi sejak awal. Manajemen juga dapat diartikan melakukan sesuatu agar lebih sesuai dan sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. (Liando, 2017, hal. 1475)

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu:

- 1) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.
- 2) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
- 3) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- 4) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa manajemen adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata to manage dan biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi manajemen adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengelola dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sementara itu, Terry (2009:9) berpendapat bahwa: Manajemen sama dengan manajemen sehingga manajemen dipahami sebagai suatu proses pembedaan terhadap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dengan memanfaatkan baik ilmu pengetahuan maupun seni dalam rangka menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang

berarti menangani atau mengelola. Dari pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen bukan sekedar menjalankan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (Ngakil, 2020, hal. 94)

b. Tujuan pengelolaan

Tujuan dari manajemen adalah agar semua sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau fasilitas dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, tenaga dan material guna mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen diperlukan di semua organisasi, karena tanpa manajemen atau manajemen semua upaya akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan : (Liando, 2017, hal. 1479)

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan review secara Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.

- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan.
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) berkala.
- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai

#### c. Fungsi pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Menurut Luther Gullick Fungsi Pengelolaan terbagi atas *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan

*Budgeting*. Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

1. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). Koonts and Donnel dalam Hasibuan, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs*. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
2. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan). *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives*. (Terry). Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
3. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). *Actuating is setting all*



*members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.* (Terry). Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans* (P. Strong). Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished* (Koontz). Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.
5. *Staffing atau Assembling resources* adalah menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi (Hasibuan).
6. *Motivating* (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan (Hasibuan).
7. *Programming* adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis (Hasibuan).
8. *Budgeting* (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya

dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional (Hasibuan).

9. *System* adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya. (<http://infoting.blogspot.com>, diakses pada 2 Februari 2015 pukul 21:00 WIB).
10. *Commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
11. *Coordinating* (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:
  - a) Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
  - b) Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
  - c) Pengarahan usaha-usaha ini.
12. *Evaluating* (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil- hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Ada beberapa hal yang penting yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi.
- b) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
- c) Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

*Reporting* (Laporan) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

- 13. *Forecasting* (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
- 14. *Facilitating*: Fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan.

Dari beberapa definisi dan konsep manajemen di atas, dapat dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan indikator fungsi manajemen atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam mendukung pencapaian individu, institusi, atau organisasi atau tujuan perusahaan. Bagi sebuah organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk

itu seluruh komponen atau unsur yang ada di dalamnya yaitu para manajer dengan berbagai kegiatannya harus fokus pada perencanaan yang berkaitan dengan persiapan staf, penentuan program pelatihan kerja dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang suatu organisasi, terutama menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan internal dan eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

d. Ciri-ciri pengelolaan yang baik

Manajemen yang baik merupakan landasan bagi perkembangan setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan manajemen yang baik, hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki alat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas suatu lembaga dalam menetapkan aturan, membuat keputusan dan mengembangkan program dan kebijakan yang mencerminkan pandangan dan kebutuhan anggota. Terutama, melalui manajemen yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggotanya, meningkatkan reputasinya, dan mempengaruhi anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan menerapkan tata kelola yang baik dalam organisasi pengusaha tidak hanya merusak reputasi, dan mengurangi efektivitas organisasi, tetapi juga berdampak negatif pada reputasi orang-orang yang diwakilinya. Manajemen yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi berjalan sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat

perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perancangan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30) adalah :

1. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
2. Memusatkan perhatian kepada sasaran
3. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
4. Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 43) adalah :

1. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
2. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.

3. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
4. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
5. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan pergerakan menurut George R. Terry (2006 : 364) adalah :

1. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

#### **4. Anggaran**

##### **a. Pengertian anggaran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dijelaskan bahwa anggaran adalah pedoman bagi tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk rencana penerimaan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis selama satu periode. Menurut Nordiawan (2006), anggaran adalah rencana keuangan yang menyatakan rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau kegiatan lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, perkiraan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam mewujudkan rencana tersebut, perkiraan sumber mana yang akan menghasilkan pendapatan, dan berapa pendapatannya. Menurut Halim (2007), anggaran adalah suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam uang dari suatu organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan suatu perkiraan pendapatan atau pendapatan untuk menutupi

pengeluaran-pengeluaran tersebut untuk suatu periode tertentu yang umumnya satu tahun. Menurut Munandar (2001) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Dari pengertian anggaran yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman bagi rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau kegiatan lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, termasuk rencana pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Menurut Freeman, diterjemahkan oleh Nordiawan, Putra, dan Rahmawati (2008) anggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengalokasikan sumber dayanya pada kebutuhan yang tidak terbatas (process of allocating resources to unlimited demand). Sedangkan menurut Adisaputo dan Asri (2003) anggaran merupakan pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya bahwa anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguhsungguh dalam bentuk tertulis
  - a) Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika
  - b) Bahwa setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang berdasar beberapa asumsi tertentu

c) Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.

b. Jenis anggaran

Anggaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu (Shim and Siegel, 2000):

1. Anggaran operasi (*operating budget*) digunakan untuk menghitung biaya produk yang diproduksi atau jasa yang dihasilkan. Anggaran jenis ini memeriksa aspek manufaktur dan operasi bisnis.
2. Anggaran Keuangan (*financial budget*) dapat digunakan untuk memeriksa kondisi keuangan dari divisi yaitu dengan memeriksa rasio aktiva terhadap kewajiban (*assets to liabilities*), arus kas, modal kerja, profitabilitas, dan statistik lainnya yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
3. Anggaran Kas (*cash budget*) digunakan untuk perencanaan dan pengendalian terhadap kas. Anggaran ini membandingkan rasio perkiraan arus kas masuk terhadap arus kas keluar untuk periode waktu tertentu. Anggaran kas mampu membantu manajer untuk memelihara saldo kas supaya seimbang dengan kebutuhan bisnis. Anggaran kas membantu manajer menghindari dari kemungkinan kekurangan kas.
4. Anggaran Pengeluaran Modal (*capital expenditure budget*) berisi proyek-proyek penting jangka panjang dan modal (aktiva tetap seperti pabrik dan peralatan) yang harus dibeli. Estimasi biaya proyek dan waktu pengeluaran modal juga terdapat dalam anggaran ini. Periode anggaran biasanya meliputi 3 sampai 10 tahun. Anggaran modal biasanya mengklasifikasikan proyek berdasarkan tujuannya seperti pengembangan lini produk baru, mengurangi biaya, mengganti peralatan yang usang atau yang sudah tidak berfungsi dengan baik, memperbesar atau merangsang lini produk, dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja.



5. Anggaran Supplemental (*supplemental budget*) memberikan pendanaan tambahan untuk item-item yang tidak termasuk dalam anggaran regular.
6. Anggaran Bracket (*bracket budget*) merupakan rencana kontijensi di mana biaya diprediksi pada jumlah yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada angka dasarnya (*base figure*). Penjualan diprediksi pada tingkattingkat yang berbeda tersebut. Bila angka dasar penjualan tidak dicapai, anggaran *bracket* memberikan manajer perasaan untuk merencanakan efek pendapatan bersih (*earnings*) dan kontijensi. Anggaran ini mungkin cocok bila diperkirakan ada risiko kerugian yang besar dan penurunan harga yang tajam.
7. Anggaran *stretch* merupakan anggaran yang optimis dan biasanya digunakan untuk penjualan yang diproyeksikan tinggi pencapaiannya. Anggaran ini sangat jarang digunakan untuk menghitung biaya. Namun bila proyeksi biaya dibuat, proyeksi ini harus berdasarkan pada target penjualan anggaran standar. Angka-angka pada anggaran *stretch* dapat formal maupun informal. Manajer operasi tidak dapat dikenai tanggung jawab untuk anggaran *stretch* ini.
8. Anggaran Strategis mengintegrasikan perencanaan strategis dan pengendalian penganggaran. Anggaran ini berguna dalam periode yang tidak menentu dan tidak stabil.
9. Anggaran Target merupakan rencana yang mengkategorikan pengeluaran-pengeluaran utama dan menyesuaikannya dengan tujuan divisi. Pembelanjaan dolar berjumlah besar memerlukan persetujuan yang khusus.

c. Penyusunan Anggaran

Anggaran haruslah menyeluruh dan dapat dicapai, dalam anggaran harus terdapat inovasi dan fleksibilitas untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diduga. Angka-angka yang dianggarkan dapat dinyatakan dalam dolar, unit, jam, pon dan karyawan. Shim and

Siegel (2000) Supaya efektif, suatu anggaran harus memiliki karakteristik berikut:

1. Kemampuan prediksi
2. Saluran komunikasi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas
3. Informasi yang akurat dan tepat waktu
4. Kesesuaian, bersifat menyeluruh, dan kejelasan informasi (%)

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penganggaran meliputi:

1. Penetapan tujuan
2. Pengevaluasian sumber-sumber daya yang tersedia
3. Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai angka-angka anggaran
4. Pengkoordinasian dan peninjauan komponen
5. Persetujuan akhir
6. Pendistribusian anggaran yang disetujui.

d. Periode anggaran

Menurut Shim dan Siegel (2000), manajer harus mulai memikirkan anggaran tahun depan beberapa bulan sebelum dimulainya tahun berikutnya, jika anggaran tahun kalender digunakan, persiapan awal dimulai pada 1 Oktober. jangka waktu tertentu, tetapi semakin lama jangka waktu yang dicakup oleh suatu anggaran, maka anggaran tersebut akan semakin tidak dapat diandalkan. Anggaran jangka pendek lebih dapat diandalkan dan menunjukkan rencana dan taktik tertentu.

Periode anggaran harus bervariasi sesuai dengan tujuan manajer dan penggunaan anggaran dalam perencanaan, sedangkan periode waktu tergantung pada penjualan, produksi, produksi dan metode operasi, siklus proses, stabilitas, risiko, akurasi data input, jenis lini produk, musiman. , perputaran persediaan. , karakteristik keuangan, ketersediaan sumber daya (bahan dan tenaga kerja), serta peraturan pemerintah dan kerangka waktu juga tergantung pada kebutuhan evaluasi. (Utomo, 2015, hal. 24)

Sebagian besar perusahaan memiliki sistem pelaporan bulanan dan tahunan, tetapi beberapa perusahaan juga menghasilkan laporan mingguan, triwulanan, dan enam bulanan. Dalam periode pelaporan dua belas bulan, kehadiran puncak dan lembah dalam statistik dapat mendistorsi hasil. Siklus ini dikenal sebagai musim dan secara signifikan dapat mempengaruhi permintaan konsumen dan pasokan dan ketersediaan bahan baku. Siklus ini dapat dihasilkan oleh sejumlah penyebab, seperti iklim. (Utomo, 2015, hal. 24)

e. Revisi anggaran

Menurut Shim and Siegel (2000), anggaran harus dimonitor dengan ketat, revisi anggaran dapat terjadi karena ada perkembangan baru, perubahan dalam keseluruhan perencanaan, teknologi baru, umpan balik, dan kesalahan. Semakin lama dan semakin kompleks anggaran, maka semakin besar kemungkinan perlunya perubahan. Ketika anggaran direvisi, manajer harus memberikan alasan-alasan secara detail. Salah satu contohnya ialah ketika usulan rencana penambahan modal yang cukup besar dibatalkan karena adanya resesi (*recessionary environment*).

f. Analisis anggaran

Menurut Shim and Siegel (2000), dalam menganalisis anggaran, angka-angka aktual harus dibandingkan dengan angka-angka yang dianggarkan dan alasan adanya *varians* diketahui dengan jelas, bersama dengan penyebabnya (*responsible parties*). *Varians* penjualan dapat dipisahkan berdasarkan volume penjualan dan harga jual sementara *varians* biaya terdiri dari harga dan kuantitas.

*Varians* laba terdiri dari *varians* penjualan dan biaya. Manajer harus menemukan cara untuk memperbaiki profitabilitas, seperti dengan mempertimbangkan hubungan antar *varians*. Misalnya, terdapat *varians* yang tidak menguntungkan dalam harga bahan yang timbul dari naiknya harga bahan. Ternyata kenaikan harga bahan disebabkan oleh meningkatnya mutu bahan. Meningkatnya mutu bahan ternyata

menghasilkan *varians* jumlah bahan dan jumlah tenaga kerja yang menguntungkan. Hasil bersihnya menguntungkan dan akhirnya membawa dampak pada kenaikan pendapatan bersih (*earnings*). (Utomo, 2015, hal. 25)

*Varians* yang tidak menguntungkan harus dikoreksi, misalnya jika harga bahan baku menjadi sangat tinggi dari yang diperkirakan, maka kita harus menemukan pemasok yang lebih murah. (Utomo, 2015, hal. 25)

Ketidakefisienan dalam hal apapun harus dikoreksi. Suatu anggaran biaya boleh memiliki *varians* yang memungkinkan adanya kenaikan *varians* yang tidak menguntungkan dalam anggaran. Hal ini dapat berasal dari kenaikan gaji yang tak terduga, harga bahan baku yang lebih tinggi, dan biaya inkremental yang terjadi bila terdapat pemogokan massal. Manajer harus dapat memutuskan alokasi kelebihan biaya dengan tepat. (Utomo, 2015, hal. 26)

g. Pengendalian anggaran

Menurut Shim and Siegel (2000), dalam pengendalian anggaran faktor-faktor internal misalnya, tenaga kerja lebih dapat dikendalikan oleh manajer dibandingkan dengan faktor-faktor eksternal seperti inflasi atau persaingan. Bila dapat dikendalikan, langkah korektif dapat diambil. Pada awal periode, anggaran merupakan rencana. Pada akhir periode, anggaran merupakan alat kendali untuk mengukur kinerja dibandingkan atas rencana, sehingga kinerja di masa yang akan datang dapat diperbaiki. Anggaran merupakan alat kendali untuk pendapatan, biaya dan operasi. Pengendalian anggaran harus ada terhadap kegiatan finansial maupun nonfinansial (seperti siklus hidup produk, musiman). Pengendalian dicapai melalui pelaporan kemajuan dan pembelanjaan aktual dibandingkan dengan perencanaan (anggaran) yang terus menerus. Hubungan input-output juga harus dipertimbangkan. Penilaian biaya (*cost appraisal*) dan kebijakan kontrol harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa proyek akan menguntungkan.

## 5. Pendapatan Nagari

### a. Defenisi pendapatan

Berdasarkan *ilmu ekonomi*, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa disebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. (Supheni, 2016, hal. 193)

Selain itu, pendapatan juga bisa didefenisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya. (Supheni, 2016, hal. 196)

### 1) Jenis-jenis pendapatan

Dalam perbankan, jenis pendapatan dibagi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

#### a) Pendapatan operasional

b) Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional kembali dibagi 2 (dua) golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor.

#### c) Pendapatan kotor

d) Pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor *return* barang dan potongan penjualan.

#### e) Pendapatan bersih

f) Pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor *return* barang dan potongan penjualan.

#### g) Pendapatan nonoperasional

h) Pendapatan nonoperasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan nonoperasional juga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni hasil sewa dan bunga.

i Hasil sewa

Merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil.

ii Bunga

Merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain.

2) Sumber-sumber pendapatan

Sumber-sumber pendapatan dibagi menjadi 3 (tiga). Menurut suparmoko dalam Artaman, 2015, ada 3 (tiga) golongan pendapatan:

- a) Dari gaji atau upah, pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 (satu) bulan. Tapi ada juga gaji yang dibayarkan per hari dan per minggu.
- b) Dari usaha sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Biasanya, pendapatan dari hasil jualan toko kelontong.
- c) Dari pendapatan lain, biasanya pendapatan lain didapat dari luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi.

b. Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Mengacu pada UU no. 6 tahun 2016 tentang desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

- 2) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- 5) Dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- 6) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- 8) Lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Pendapatan asli desa (PADes)

Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa.

- 2) Transfer

Pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu point b sampai dengan f diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa.

- 3) Pendapatan lain-lain

Yang terakhir, pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dalam hal inilah BUMDesa berperan sebagai salah satu penyumbang untuk menaikkan PADes, sehingga mendapatkan desa

dapat menjadi kekuatan yang produktif tidak hanya digunakan untuk konsumsi.

## 6. Belanja Nagari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNag, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari melalui Peraturan Nagari. Tahun anggaran APNag meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBNag, belanja Nagari dan pembiayaan.

Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan Nagari meliputi:

- a. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Nagari.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proposional yang merupakan alokasi dana Nagari.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## B. Kajian Relevan

**Tabel 2.1**  
**Hasil penelitian yang relevan**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan



				Penelitian
1	Dinar Aji Atmaja (2016)	Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa	pengeluaran APBDesa untuk keperluan kegiatan desa. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa plesungan. Kepala Desa Plesungan bernama Bapak Waluyo adalah pemegang kekuasaan di pemerintahan Desa Plesungan untuk pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. Menetapkan Sekretaris, Kepala Seksi, dan Bendahara. Menetapkan petugas untuk meminta pungutan penerimaan desa.	Perbedaanya, adalah penelitian ini khusus membahas tentang kekayaan desa itu sendiri. Penelitian ini khusus membahas keuangan dari kekayaan desa saja. Persamaanya, sama-sama mengelola keuangan yang berada pada suatu desa atau nagari tersebut.
2	Suci	Akuntabilitas dan	Proses pencatatan	Perbedaannya,

	Indah Hanifah (2015)	Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 karena di Desa Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya di catat ke dalam buku kas harian dan Desa Kepatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara maksimal.	penelitian ini tidak hanya membahas tentang pembangunan suatu desa tersebut melainkan juga mensejahterakan masyarakatnya dalam bidang pendidikan. Persamaannya, sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pendapatan belanja desa dari pemerintah.
3	Budi Putri Utami (2017)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Gondangsari	Perbedaannya, pembangunan yang dilaksanakan

		<p>Belanja Desa (Apbdes): Transparansi Dan Akuntabilitas Di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten</p>	<p>Juwiring Klaten, dapat diambil beberapa kesimpulan. Perencanaan program APBDes di Desa Gondangsari telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program APBDes di Desa Gondangsari telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada</p>	<p>oleh desa tersebut tidak hanya keluar dana dari desa tersebut melainkan juga adanya partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan didesa tersebut. Persamaannya, juga sama sama membahas tentang akuntabilitias dan transparansi pendapatan dan belanja desa, di desa Gondangsari juwiring Klaten.</p>
--	--	---	--	---

			semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Klaten meskipun masih ada kekurangan.	
4	Rizal (2016)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2016	Dalam pengelolaan APB Nagari, pemerintah nagari harus memenuhi asas akuntabel. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah nagari harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterimanya dan dana yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan.	Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya terfokus pada pembangunan pada desa atau nagrai tersebut. Persamaannya, sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
5	Indriani Supheni (2016)	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 di Desa	Perbedaannya, penelitian ini hanya membahas tentang akuntabilitas pengelolaan

		(Apbdes)	<p>Kerepkiidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa: Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kerepkiidul secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Kerepkiidul dalam pelaksanaannya.</p>	<p>anggaran pendapatan dan belanja desa saja. Persamaannya, sama-sama mewujudkan pembangunan didesa atau nagari tersebut yang baik dan benar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan baik.</p>
6	M. Fajar Akbar (2017)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Nagari Salimpaung. Berdasarkan	Perbedaannya, penelitian ini juga meneliti bagaimana kinerja suatu nagari tersbut

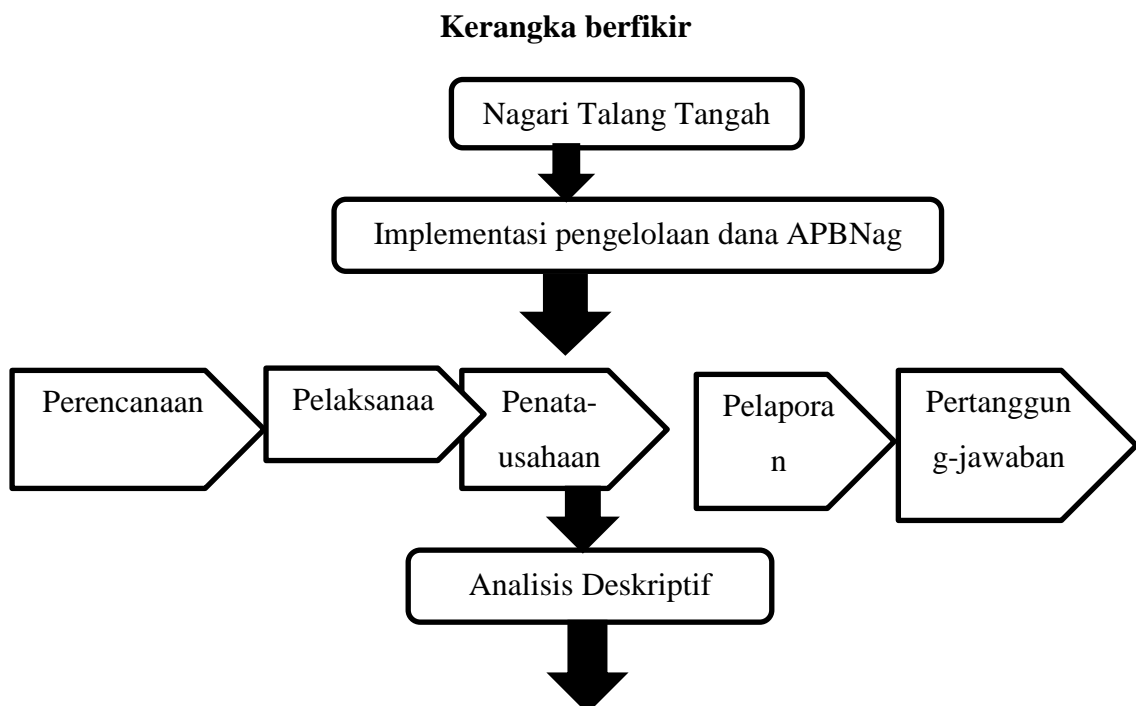
		<p>(Apbdesa) Nagari Salimpaung Tahun 2016</p>	<p>standar/kriteria akuntabilitas yang penulis terapkan, secara umum pemerintah nagari salimpaung sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dapat dilihat dengan kemampuan Nagari Salimpaung dalam membuat dan menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang tersaji dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester kedua yang disampaikan kepada Bupati, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung</p>	<p>tidak terfokus pada pembangunan dari nagari itu saja. Persamaannya, sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi belanja desa.</p>
--	--	---	--	--

			<p>dalam pembangunan dan pemerintahan, serta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. Namun pemerintah nagari salimpaung belum menyediakan sarana kepada publik untuk menilai kinerja pemerintah nagari.</p>	
--	--	--	---	--

*Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber*

### C. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka berfikir.



Standar/kriteria Akuntabilitas dan Transparansi	
Akuntabilitas	Transparansi
1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.	1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.	3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.	4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.	5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.	

Kesimpulan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang di pakai adalah deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah. Menurut Sangdji dan Sopiah (2010: 21) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari di Nagari Talang Tengah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) untuk Tahun Anggaran 2020.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor pemerintahan Nagari Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Sedangkan waktu penelitian telah dilakukan pada bulan Desember 2021.

#### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang pertamakali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi

kesejangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBNag di Nagari Talang Tengah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Nagari Talang Tengah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Buku Bank Nagari Talang Tengah Tahun 2020, Laporan Keuangan Nagari Talang Tengah Tahun 2020, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Pemerintah Nagari Talang Tengah Tahun Anggaran 2020.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut Sutopo (2002), teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena di gunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi (Noerdiawan, 2010: 180).

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan aparat pemerintah desa yang bertugas

pengelola APBNag. Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi informan, merupakan aparat pemerintah pengelola APBNag, para pengguna APBNag, serta peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang meliputi informan, bisa saja peneliti membuang informan yang tidak layak.

Sebelum dilangsungkan wawancara, Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Nagari Talang Tengah sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Pemerintah Nagari Talang Tengah terkait dengan pelaksanaan APBNag, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat APBNag. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

## **E. Teknik Analisis Data**

Sugiono (2010: 244), menjelaskan bahwa analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sengan cara mengorganisasikan data sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Faridah (2015), Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut :

#### 1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

Dan dari interview (wawancara) pada penelitian ini disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut.

#### 2. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data tersebut dilakukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh oleh peneliti berupa simbol, statement, kejadian, dan lainnya. Sehingga akan timbul masalah karena data masih mentah, jumlahnya yang masih banyak dan bersifat non kuantitatif (sangat deskriptif) sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk analisis.

#### 3. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

#### 4. Hasil Interpretasi

Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian.

Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interpretasi dan pandangan Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Talang Tengah. Interpretasi atas data yang didasarkan pada teori legitimasi dan teori stakeholder yang muncul pada saat pengumpulan data dilapangan, yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan.

**Tabel 3.1**  
**Standar atau Kriteria Akuntabilitas dan Transparansi**

<b>Variabel</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
<b>Akuntabel</b>	1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat.	Pemerintah nagari menyajikan/menyerahkan informasi penyelenggaraan pemerintah nagari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati dalam waktu: 1. Laporan semester pertama diserahkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. 2. Laporan semester kedua diserahkan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
	2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.	Pemerintah nagari harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakatnya,

		<p>diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.</li> <li>2. Kenyamanan dalam memberikan pelayanan.</li> <li>3. Kemudahan dalam proses pelayanan.</li> <li>4. Memberikan pelayanan yang sama dan adil kepada masyarakatnya.</li> <li>5. Merespon setiap keluhan masyarakat.</li> </ol>
	3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah nagari mengajak dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan nagari mulai dari penyusunan rencana pembangunan nagari sampai pelaksanaan pembangunan nagari.</li> <li>2. Pemerintah nagari menerima usulan/masukan dari masyarakat saat perumusan program nagari dan penetapan anggaran nagari.</li> </ol>
	4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah nagari mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran.</li> <li>2. Pemerintah nagari</li> </ol>

		menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag kepada masyarakat dan badan permusyawaratan nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah nagari.
	5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.	Pemerintah nagari menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah nagari, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah nagari Menyediakan kotak saran untuk peningkatan pelayanan publik.</li> <li>2. Musyawarah nagari sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.</li> </ol>
<b>Transparan</b>	1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.	Pemerintah nagari menyediakan informasi kebijakan penggunaan anggaran yang memuat laporan realisasi pembangunan nagari, laporan realisasi anggaran, dan sebagainya di papan pengumuman informasi nagari/media yang disediakan pemerintah nagari.
	2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.	Pemerintah nagari menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses melalui:

		<p>1. Media cetak.</p> <p>2. Media lainnya yang disediakan pemerintah nagari.</p>
	<p>3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.</p>	<p>Pemerintah nagari menyajikan/menyerahkan informasi penyelenggaraan pemerintah nagari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati dalam waktu:</p> <p>1. Laporan semester pertama diserahkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.</p> <p>2. Laporan semester kedua diserahkan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.</p>
	<p>4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.</p>	<p>Pemerintah nagari menerima suara/usulan rakyat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.</p>
	<p>5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.</p>	<p>Pemerintah nagari memberikan layanan informasi langsung atau tidak langsung mengenai informasi yang berkaitan dengan pemerintah nagari, kegiatan dan kinerja pemerintah nagari, dan laporan keuangan pemerintah nagari melalui media surat kabar,</p>



		surat edaran, dan website.
--	--	----------------------------

*Sumber: Sopanah dan Mardiasmo dalam (Ony dan Irvan, 2012, p. 68)*

#### **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Meleong, 2005: 330). Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara triangulasi. Triangulasi teknik dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. (Sugiyono, 2014, p. 274).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Nagari Talang Tengah**

Sejarah terbentuk Nagari TalangTengah dan kantor wali nagari Talang Tengah, Menurut alur cerita yang diteima, bahwa Nagari Talang Tengah berasal dari kata “tolong ditongah” dan akhirnya dirobah menjadi Talang Tengah sebagaimana seperti saat sekarang ini. Pada waktu dahulunya nagari ini bernama “Kampong Dalam” sebagai pusat Nagari yang beralokasi dimedan nan satangkai, ketika itu masyarakat sedang melaksanakan gotong royong pada sebidang tanah yang tertinggi terletak ditengah-tengah nagari ( medan satangkai sekarang ) yang dipimpin oleh dua orang pemimpin yang bernama **“Unjuk yang bergelar Dt Mangkuto Rajo dan Sumpik yang bergelar Dt. Kayo”** kedua pemimpin ini minta tolong kepada seluruh peserta gotongroyong dengan sebutan **“Tolong ditongah”** sehingga tanah menjadi datar dan setelah tanah tersebut menjadi datar kedua pemimpin ini mengumpulkan seluruh peserta gotongroyong untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat untuk memberi nama nagari, sehingga pada waktu itu disepakati nama nagari menjadi “TalangTengah” sampai saat sekarang ini.

Nagari TalangTengah merupakan salah satu nagari dari 10 ( sepuluh ) nagari yang ada dalam kecamatan Sungai Tarab dan merupakan bagian dari 75 ( tujuh puluh lima ) nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terletak pada  $00^{\circ} 17' \text{ LS} - 00^{\circ} 39. \text{LS}$  dan  $100^{\circ} 19' \text{ BT} - 100^{\circ} 51, \text{ BT}$  mempunyai luas  $3,5 \text{ Km}^2$ , serta mempunyai ketinggian dari permukaan laut  $\pm 800$  sampai dengan 900m yang terdiri dari 2 ( dua ) jorong yaitu Jorong Talang Tengah dan Jorong Gunung Medan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan negarari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum.
3. Sebelah Barat berbatas dengan Gunung Merapi

4. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

Luas wilayah nagari Talang Tengah adalah 3,5 km<sup>2</sup> atau 350 Ha dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah**

No	Uraian	Jumlah
1.	Perumahan/pemukiman	24 ha/m <sup>2</sup>
2.	Persawahan	174 ha/m <sup>2</sup>
3.	Perkebunan	94 ha/m <sup>2</sup>
4.	Hutan rakyat	1 ha/m <sup>2</sup>
5.	Perkarangan	5 ha/m <sup>2</sup>
6.	Taman	0,75 ha/m <sup>2</sup>
7.	Perkantoran	0,25 ha/m <sup>2</sup>
8.	Prasaranan umum lainnya	2 ha/m <sup>2</sup>

*Sumber: Data Kantor Wali Nagari Talang Tengah*

Visi: “TERWUJUDNYA NAGARI TALANG TANGAH YANG MADANI, BERBUDYA DAN SEJAHTERA DALAM NIALAI NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

Misi:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama, adat dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah Nagari Talang Tengah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Nagari Talang Tengah.

Nagari Talang Tengah terdiri dari 2 ( dua ) jorong yaitu Jorong Talang Tengah dan Jorong Gunung Medan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Merapi.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

Struktur organisasi pemerintahan Nagari Talang Tengah dibentuk berdasarkan kepada: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN ), sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Struktur Organisasi Nagari Talang Tengah**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1.	Andry Andres	Wali Nagari	SLTA	46 Th
2.	Zulbaidar	Sekretaris	SLTA	45 Th
3.	Nur Azizah	Kaur umum	SLTA	21 Th
4.	Ramli	Kaur Pemerintahan	SLTA	30 Th
5.	Muslim Ramadan	Kaur perekonomian	SLTA	22 Th
6.	Ari purnama	Kaur pembangunan	SLTA	20 Th
7.	Nova Linda	Kaur kesra	SLTA	33 Th
8.	Maslinar Amir	Wj. Talang Tengah	SLTA	47 Th
9	Maferdi	Wj. Gunung Medan	SLTP	45 Th

10.	Darmawenita	Bendahara	SLTA	45 Th
-----	-------------	-----------	------	-------

*Sumber: Data Kantor Wali Nagari Talang Tengah*

BPRN yang merupakan komponen Pemerintahan nagari, senantiasa mengupayakan terciptanya suasana yang kondusif guna mendukung terlaksananya pembangunan dan pengembangan nagari dengan baik, serta merangsang tumbuh dan berkembangnya kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan nagari. Selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun ini terhitung dari tahun 2009 sampai saat sekarang ini ( 2014 ) telah menunjukkan kinerjanya yang baik dan mampu menjembatani pihak eksekutif masyarakat dan memberikan pengertian serta penjelasan program nagari.

Adapun struktur kelembagaan BPRN Talang Tengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Struktur BPRN Talang Tengah**

N o	Nama	Jabatan	Pendidik an	Pekerjaan	Umur
1.	Yusmardi	Ketua	SLTA	Sopir	49 Th
2.	Dasmairi, S. Pd	Wakil ketua	SLTA	Guru	50 Th
3.	Masrial	Sekretaris	SLTA	Petani	43 Th
4.	Sabrin Sabar	Anggota	SLTA	Petani	64 Th
5.	Zy. Dt. Pangindo Penghulu	Anggota	SLTA	Pensiunan	66 Th
6.	Rahman Budi Santoso	Anggota	SLTA	Petani	46 Th
7.	Dewi Novilawati	Anggota	SLTA	Petani	30 Th

*Sumber: Data Kantor Wali Nagari Talang Tengah*

Persebaran penduduk di Nagari Talang Tengah cenderung beragam, dimana jumlah penduduk per jorongnya berbeda-beda. Berdasarkan data

terakhir dari sadgas pada tahun 2020 , dapat dilihat jumlah penduduk Nagari Talang Tengah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah penduduk nagari Talang Tengah**

N o	Uraian	Jorong Talang Tengah	Jorong Gunung Medan	Jumlah
1	Kartu keluarga	210	121	331
2	Penduduk	639	382	1021
3	Laki-laki	319	194	513
4	Perempuan	320	188	508

*Sumber: Data Kantor Wali Nagari Talang Tengah*

Secara teoritis bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar utama dalam pembangunan. Dengan demikian jumlah penduduk yang besar tersebut sangat menentukan arah pembangunan disuatu daerah atau nagari, apabila masyarakat tersebut diberdayakan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dan sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar ini tidak diberdayakan/dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi beban bagi pemerintahan nagari untuk masa yang akan datang. Kepadatan penduduk nagari Talang Tengah tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah nagari Talang Tengah menyebar didua jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

## **B. Temuan Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah Tahun 2020**

Dalam pemerintahan, Nagari atau Desa telah diatur dalam aturan hukum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari atau Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Didalam peraturan tersebut telah diatur finansial nagari, berawal dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) dan pengelolaannya, dan

sampai pada pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa.

Dalam pelaksanaannya baik dipemerintahan nagari talang tengah maupun dipemerintahan nagari atau desa lainnya, pemerintah nagari wajib mengelola keuangan nagari secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Ketiga point tersebut sangat berkaitan erat dalam pelaksanaannya. Disamping itu, keuangan Nagari Talang Tengah harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Berikut penjabaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah dimulai dari:

#### **a. Perencanaan**

Berikut ulasan dari Bapak Wali Nagari Talang Tengah mengenai perencanaan dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari di Nagari Talang Tengah, dimana pertanyaan yang diajukan bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan nagari dalam melakukan perencanaan pengelolaan anggaran:

“Dalam perencanaan disini mekanismenya kita berkumpul duduk bersama dengan lembaga unsur untuk merapatkan perencanaan yang akan kita buat nantinya, disini lembaga unsur yang menghadiri rapat tersebut hanya orang tertentu saja yang ditelah ditetapkan sebelumnya. Setelah hasil rapat didapatkan atau diperoleh maka barulah nantinya hasil tersebutv akan disetujui atau disahkan oleh BPRN.”

(Andry Andres, Selasa pukul 11.00 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Ulasan dari bapak wali nagari diatas dapat menggambarkan bahwa memang sudah dilaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya untuk proses awal dalam pengelolaan anggaran tersebut, tetapi disini yang menjanggal dan menjadi masalah ialah yang mengikuti rapat dalam proses perencanaan tersebut hanyalah lembaga unsur yang telah ditetapkan sebelumnya dan disini tidak disebutkan bahwa tidak ada msyarakat yang diikutsertakan dalam rapat. Yang ditetapkan sebelumnya hanyalah orang-orang yang telah dipilih atau ditetapkan sebelumnya. Disini teritimidasi bahwa dalam proses perencanaan belum adanya tranparansi atau keterbukaan untuk masyarakat umum yang ingin tahu dalam proses tersebut.

#### **b. Pelaksanaan**

Semua kegiatan pelaksanaan yang didanai oleh dana nagari direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka. dengan melibatkan lembaga unsur dan BPRN yang ada pada pada masyarakat nagari Talang Tengah, seluruh yraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja setiap bidang mengacu pada rencana kerja pemerintah nagari dan renacan pembangunan jangka menengah nagari sesuai dengan kewenangan nagari.

Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari memuat peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari, peraturan nagari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Berikut ulasan selaku bapak Wali Nagari di Talang Tengah mengatakan bahwa:

“Setiap kegiatan yang akan dilakukan selalu dirapatkan, yang mana terlebih dahulu dilakukan selalu dengan melibatkan lembaga unsur dan BPRN. Terus pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan nagari yang ada dimana setiap pelaksanaannya dapat



dipertanggung jawabkan oleh kami selaku pemerintah nagari. Nantinya dalam pelaksanaan barulah msyarakat bisa kami ikut sertakan didalamnya, dimana masyarakat yang bekerja contohnya dalam rehap bangunan pastu Nagari Talang Tengah melibatkan msyarakat dalam pengerjaanya dan sasaran atau kegunaannya juga untuk masyarakat itu sendiri. Masih banyak pelaksanaan-pelaksanaan yang lain dimana juga banyak melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya, dimana tepatnya diupahkan kepada msyarakat” (Andry Andres, Selasa pukul 11.11 Wib tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksaan di Nagari Talang Tengah tidak hanya melibatkan lembaga unsur tertentu dan BPRN saja, akan tetapi juga melibatkan msyarakat umum dalam pelaksanaannya untuk tepatnya dilibatkan dalam memperkejakan masyarakat tersebut.

### **c. Penata usahaan**

Sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, bahwa seharusnya yang melakukan penetausahaan disini adalah Bendahara Nagari. Dalam penata usahaan ini disini yang terlibat langsung adalah pemerintah nagari itu sendiri. Dimana pemeritah nagari sudah membagi tugas masing-masing yang telah ditetapkan sebelumnya. Ditetapkan itupun sebelum tahun anggaran. Dalam penetausahaan pengelolaan alokasi dana Nagari Talang Tengah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Nagari Talang Tengah sebagai berikut: “untuk penetausahaan Nagari Talang Tengah kami sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dimana penetausahaan disusun oleh bendahara nagari dan sudah mengacu pada permendagri 113, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.” (Andry Andres, Selasa pukul 11.00 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Diperkuat kembali oleh penjelasannya oleh bapak Wali Nagari sebagai berikut: “untuk proses kegiatan pencatatan sudah sesuai dengan

ketentuan yang ada dimana harus ada pembukuan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk melakukan semua itu adanya pedoman untuk menyusun pelaporan atau pencatatan contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan.” (Andry Andres, Selasa pukul 11.30 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Untuk penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Talang Tengah sudah pengacu pada permendagri yang mana semua tatacaranya sudah diatur bahkan pihak kecamatanpun menyediakan bahan atau contoh untuk pencatatan yang mudah untuk ditiru oleh nagari, agar bisa lebih mudah dan paham dalam pencatatan tersebut. Dan yang melakukan tugas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan tugas masing-masing dimana yang bertugas sebagai bendahara nagarilah yang melakukan hal tersebut.

#### **d. Pelaporan**

Setiap organisasi baik kecil maupun besar selalu memiliki pertanggungjawaban pelaporan yang menyangkut keuangan. Begitupun dengan Nagari Membuat laporan keuangan adalah kewajiban bagi sebuah Nagari. Pelaporan atau pertanggungjawaban dana Nagari terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNag sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari. Namun demikian pihak nagari wajib untuk melaporkan pelaksanaan dan penyerapan dana.

“laporan realisasi pelaksanaan APBNag itu dilaksanakan dalam dua tahap yaitunya pada semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama adalah laporan realisasi pelaksanaan APBNag yang dilaporkan pada akhir bulan Juli saat tahun berjalan. Dan pelaporannya melalui BPRN selaku pengawas kegiatan Nagari. Setelah itu ke Kecamatan sebagai pengantar dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk nantinya disampaikan kepada Bupati. Laporan semester kedua ini

berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag yang dilaporkan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya melalui Camat.” (Andry Andres, Selasa pukul 11.30 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Untuk pelaporan yang dilakukan oleh Nagari talang tengah nuga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakuka juga sesuai dengan aturan tersebut. Disini akuntabilitas atau pertanggungjawbaan Nagari Talang Tengah sudah memenuhi kriteria atau aturan yang berlaku.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Dijelaskan pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 bahwa, wali nagari menyampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan Nagari yang dilampiri dengan beberapa berkas sebagai berikut:

- 1) Pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag tahun anggaran berkenaan.
- 2) Pelaporan pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Nagari.
- 3) Pelaporan kekayaan milik nagari pada akhir bulan desember pada tahun anggaran berkenaan.

Kegiatan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah disamapaikan oleh bapak Wali Nagari sebagai berikut: “wali Nagari sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati Tanah Datar setiap akhir tahun anggaran karena. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanann APBNag terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Tidak itu saja melainkan kami juga menyampaikan laporan pertanggungjawban seluruh aset milik Nagari Talang Tengah kepada pemerintah Kabupaten ” (Andry Andres,

Selasa pukul 11.30 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berdasarkan pernyataan bapak Wali Nagari diatas, Nagari Talang Tengah telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintah nagari yang didalamnya terdapat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNag) dan laporan kekayaan milik Nagari.

## **2. Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah Tahun 2020**

Semua kegiatan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya akan didanai alokasi dana nagari terutama untuk pembangunan yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di nagari, dimana apapun kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan. Dana bantuan program lokasi dana nagari yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah nagari yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan alokasi dana Nagari yang diterima setiap nagari digunakan untuk komponen sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintah Nagari
- b. Pelaksanaan pemerintah Nagari
- c. Pelaksanaan kemasyarakatan Nagari
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

Dalam mengelola anggaran pendapatan nagari tersebut (APBNag) pemerintah Nagari Talang Tengah akan disebut akuntabel jika telah memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.

- 1) Pelaporan atau penyajian realisasi anggaran Nagari Talang Tengah sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah.

Hasil wawancara dengan sekretaris Nagari Talang Tengah perihal kegiatan pelaporan anggaran Nagari Talang Tengah: “Nagari Talang Tengah dalam membuat atau menyajikan laporan realisasi anggaran sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020” (Zulbaidar, Selasa pukul 14.00 Wib tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah).

Hal ini memperlihatkan bahwa sistem Pemerintah Nagari akan dikategorikan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja nagari karena telah membuat hasil laporan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Negara maupun dipemerintahan daerah. Praktik akuntabilitas juga dinilai dari cara penyampaian laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan realisasi anggaran peraturan kepada Bupati Tanah Datar. Berikut ini adalah hasil jawaban informan terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban Nagari Talang Tengah.

- 2) Bentuk laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Nagari Talang Tengah.

Hasil wawancara dengan sekretaris Nagari Talang Tengah perihal laporan pertanggung jawaban Nagari Talang Tengah: “Pemerintah Nagari Talang Tengah sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban yaitunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN). Kemudian LPPN (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari) yaitu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada Bupati. Tetapi untuk ILPPN (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari) yaitu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada masyarakat belum tersampaikan kepada msyarakat. Bentuk ILPPN yaitu berupa

informasi mengenai daftar kegiatan pembangunan fisik Nagari Talang Tengah dan daftar kegiatan pemberdayaan Nagari Talang Tengah per tahun anggaran yang ada di spanduk atau baliho yang ada di kantor Wali Nagari Talang Tengah. Hal tersebut belum dilakukan karena belum mendukungnya situasi dan kondisi keadaan kantor kami” (Zulbaidar, Selasa pukul 14.00 Wib tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berdasarkan jawaban di atas, dapat diketahui bahwa Sekretaris Nagari sudah membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan yang dilaporkan kepada Bupati Tanah Datar. Dimana yang dilaporkan tersebut yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN). Tetapi informasi laporan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat belum dilaporkan oleh pemerintah Nagari Talang Tengah kepada masyarakat umum. Disini mereka beralasan belum melaporkannya karena tidak mendukungnya situasi dan kondisi keadaan kanto mereka.

3) Kesulitan dari pemerintah Nagari dalam membuat pertanggungjawaban administrasi

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Talang Tengah: “dalam membuat penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari kami memang mengalami beberapa kesulitan dalam penyusunannya, akan tetapi kami dimudahkan karena adanya panduan dari untuk penyusunan dari pemerintah Daerah. Kesulitan-kesulitan yang kami alami tersebut seperti perencanaan yang telah kita buat untuk tahun ini dan anggaran yang telah dibuatkan untuk tahun ini sudah siap. Tetapi yang dalam masalah adalah misalnya anggran yang harus kami lakukan pada bulan dua sudah harus ada dana tetapi dana mencair pada bulan lima. Disitulah nagari mengalami kesulitan dalam melakukan atau merealisasikan anggaran. Tetapi kami selalu mencari solusi untuk hak tersebut jika

untuk kebutuhan mendesak maka terlebih dahulu kami juga tidak bisa menggunakan dana silva tahun lalu yang masih bersisa melainkan menggunakan dana lain untuk sementara, dikarenakan dana yang bersisa paling lambat dilaporkan kepada bupati satu bulan setelah anggaran berakhir.” (Zulbaidar, Selasa pukul 14.00 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Begitulah tanggapan Sekretaris saat menghadapi kesulitan dalam membuat pelaporan pertanggung jawaban. Untuk membuat laporan oertanggungjawabannya mereka tidak mengalami begitu bnyak kesulitan tetapi kesulitan yang dihadapi pada saat perealisasi dana yang terjadi sebelum dana mencair.

4) Proses waktu penyampaian informasi laporan pertanggung jawaban

Hasil wawancara dengan sekretaris Nagari Talang Tengah perihal proses waktu penyampaian LPJ Nagari Talang Tengah: “Pemerintah Nagari Talang Tengah telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada Bupati Tanah Datar secepat mungkin dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa anggaran tersebut berakhir.” (Zulbaidar, Selasa pukul 14.30 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berdasarkan informasi di atas, informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Nagari Talang Tengah telah membuat bahkan menyampaikan laporan tersebut pada waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Laporan tersebut telah akuntabel dimana laporan tersebut dapat di[ertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah Kabupaten tanah Datar.

b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

1) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Nagari Talang Tengah kepada masyarakat

Berikut hasil wawancara dari sekretaris Nagari Talang Tengah: “pemerintah Nagari Takang tengah telah mengupayakan

memberikan pelayanan terbaik tanpa memandang apapun siapapun yang akan dilayani tanpa membeda-bedakannya dan telah memberikan pelayanan yang ramah, sopan, serta tepat waktu. Dalam menciptakan anggaran yang partisipatif, masyarakat haruslah ikut serta dalam pembahasan dan penetapan anggaran nagari. Masyarakat juga dituntut untuk memberikan usulan mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di Nagari Talang Tengah” (Zulbaidar, Selasa pukul 14.30 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Jawaban informan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari sudah siap dalam menjalankan transparansi yang bersifat partisipatif bagi masyarakatnya untuk mengetahui tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag).

Tetapi masyarakat nagari Talang Tengah menungkapkan hal sebagai berikut: “Dari penetapan peraturan Nagari tentang APBNag masyarakat ikut terlibat, akan tetapi tidak seluruh masyarakat yang terlibat. Yang terjadi pada realitanya adalah Hanya lembaga-lembaga unsur dari masyarakat saja yang terlibat, dari lembaga unsur tersebut tidak semua yang terdaftar dalam lembaga unsur ikut terlibat didalamnya melainkan hanya orang yang biasa telah ikut sebelumnya yang mereka tunjuk.” (Irwanto, Rabu pukul 13.00 Wib tanggal 22 Desember 2022 di Jorong Talang Tengah, Nagari Talang Tengah)

Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa perannya dalam pertanggung jawaban akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah. Berikut ini adalah jawaban masyarakat saat ditanyakan bagaimana jalannya musyawarah sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari: “Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, biasanya pihak Wali Nagari telah melakukan musyawarah tersendiri dan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan,



berapa dananya, dari mana sumber dananya, dan bobot kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah tersebut yaitu menetapkan siapa yang akan menjadi TPK (Tim pelaksana kegiatan), masyarakat yang ditunjuk untuk melakuakn pekerjaan tersebut telah tetapkan menjadi anggota TPK sebelumnya.” (Ermitawati, Rabu pukul 16.00 WIB tanggal 22 Desember 2022 di Jorong Talang Tengah, Nagari Talang Tengah)

Sedangkan menurut kepala jorong Gunung Medan Nagari Talang tengah mengungkapkan sebagai berikut: “sebelum melakukan pembangunan di Nagari Talang Tengah maka bapak wali nagari akan mengadakan *briefing* agar nagari tersebut melakukan musyawarah mengenai pembangunan atau disebut ditalang tengah dengan (MUSREMBANG), sebelumnya terlebih dahulu mengadakan musyawarah-musyawarah tertentu seperti PRAMUSREMBANG. Dimana dalam PRAMUSREMBANG tersebut dilaksanakan terlebih dahulu musyawarah yang dinamakan dengan MUSJOR. Setelah kesepakatan terbentuk dalam MUSJOR maka akan mengadakan kembali musyawarah yang dinamakan MUSNAG, setelah kesepakatan terbentuk dalam MUSNAG maka barulah MUSREMBANG diadakan di Nagari Talang Tengah.” (Muslim Ramadhan, Rabu pukul 13.00 WIB tanggal 22 Desember 2022 di Jorong Gunung Medan.

Ketua BPRN juga ikut mengungkapkan mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Nagari Talang Tengah: “Menurut bapak semua yang dilakukan pihak Nagari sudah sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya, mengapa demikian, setiap adanya rapat yang akan diadakan selalu diinformasikan kepada saya tepat waktu. Bukan karena bapak sebagai ketua di Nagari Talang Tengah ini. melainkan selama yang saya lihat dan ketahui layanan yang diberikat pihak pemerintah nagari sudah sangat baik tidak memandang dari jorong gunung medan atau dari jorong talang

tengah, pelayanan yang diberikan tidak dibedakan sama sekali.” (yusmardi, Kamis pukul 16.00 WIB tanggal 23 Desember 2022 di Jorong Talang Tengah)

Ibuk PKK di Nagari Talang Tengah berasal dari Jorong Gunung Medan juga merupakan sebagai bundo kanduang dan sekaligus anggota SATGAS Bencana mengungkapkan sebagai berikut: “Pihak Wali Nagari dalam memberikan pelayanan menurut saya sudah cukup baik mengapa saya katakan demikian karena setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat nagari talang tengah diinformasikan melalui mikrofon masjid Nurul A’la, tetapi yang diinformasikan di sana hanya mengenai masyarakat yang mendapat sembako, pertemuan PKH, BLT Desa, dan bagi yang belum membayar listrik. Tetapi informasi tersebut hanya bisa diakses oleh Masyarakat Jorong Talang Tengah saja. Kami warga Jorong Gunung Medan tidak bisa mengakses informasi tersebut dikarenakan jarak masjid Nurul A’la dari jorong Gunung Medan cukup jauh. Kendala lainnya adalah informasi yang diakses tersebut hanya menai itu saja. Untuk informasi yang lain kita bisa mengetahuinya terkhusus ke kantor wali Nagari untuk mencari tahunya yang mana kantor Wali Nagari sekarang sudah pindah ke Gedung Taman Kanak-Kanak.” (Witri Yulidar, Kamis pukul 09.00 WIB tanggal 23 Desember 2022 di Posyandu Jorong Gunung Medan)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang ikut serta menjadi panitia pelaksana pembangunan Nagari yang disebut dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tetapi dalam pembicaraan beberapa informan di atas terlihat bahwa memang semua sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah, tetapi yang ikut terlibat di dalamnya hanya orang-orang tertentu saja, yang mana mereka telah ditunjuk atau berkecimpung di dalamnya sebelumnya.

c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

1) Masyarakat yang ikut menghadiri dalam permusyawaratan pelaksanaan pembangunan Nagari

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Talang Tengah: “Untuk musyawarah dusun masing-masing per jorong dipimpin kepala jorongnya dan perwakilan bersama tokoh masyarakat. Sedangkan musyawarah Nagari itu dipimpin langsung oleh Bapak Wali Nagari, perangkat Nagari, semua kepala Jorong, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.” (Zulbaidar, Selasa pukul 14.30 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berikut adalah penjelasan dari sekretaris Nagari Talang Tengah, dapat dilihat bahwa seluruh elemen masyarakat terwakili sebagai peserta musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari tersebut. Tetapi bagaimana cara pemerintah Nagari menanggapi dan mengkoordinir segala masukan dari peserta musyawarah.

Berikut adalah ulasan dari sekretaris Nagari Talang Tengah: “kami menerima semua saran dan masukan dari semua anggota rapat. Semua masukan dari masyarakat ditampung di dalam musyawarah. Usulan dari masyarakat telah tersampaikan melalui unsur-unsur masyarakat yang mewakili masyarakat dalam rapat. Karena pastinya unsur dari masyarakat yang ditunjuk dalam rapat telah memngantongi usulan rakyat terlebih dahulu, barulah nantinya usulan tersebut dipertimbangkan dan dirapatkan kembali mana yang terlebih dahulu yang paling urgen untuk ditinjau lanjuti.” (Zulbaidar, Selasa pukul 14.30 WIB tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah ikut serta menjadi pengsul suara tetapi suara

rakyat hanya diwakilkan melalui lembaga unsur yang telah ditunjuk dan ikut rapat. Anggota lembaga unsur yang diikutsertakan tersebut, merupakan lembaga unsur yang telah disepakati sebelumnya.

- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- 1) Semua yang direncanakan sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan program dana Nagari

Berikut hasil wawancara dengan bendahara nagari talang tengah: “Memang benar sekali, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa semua yang dilaksanakan di Nagari itu berdasar dari hasil mufakat bermusyawarah yang ada di Nagari Talang Tengah ini, memang semua yang akan kami laksanakan itu memang benar-benar sesuai dengan hasil musyawarah. Jadi hasil dari musyawarah di Nagari Talang Tengah, itulah yang akan dikerjakan oleh tim pelaksana (TPK) nantinya, dan apa yang telah disepakati sebelumnya kadang tidak semua itu di realisasikan. Realisasi tersebut bukan terjadi karena apa-apa, terkadang semua itu tidak bisa terlealisasi sebagaimana mestinya dikarenakan waktu yang tidak cukup atau kadang perkiraan dana yang salah. Perkiraan dana yang salah sering trjadinya SILPA.” (Darmawenita, jumat pukul 11.00 WIB tanggal 24 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Jadi semua rencana pembangunan yang dilakukan nagari belum tentu bisa terlisasi sebagaimana yang telah direncanakan. Tetapi walaupun nagari talang tengah tidak dapat merealisasikan keseluruhan dari rencana yang telah dibuat. Nagari Talang Tengah tetap dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang mereka lakukan setelah mereka laporkan dan pertanggungjawabkan terlebih dahulu.

2) Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Nagari Talang Tengah

Berikut ulsan dari bapak wali nagari talang tengah: “sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya kami dapat memepertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang kami lakukan. Seluruh kegiatan yang kami lakukan denagn bersumberkan dana anggaran Nagari dapat kami pertanggungjawabkan dan telah kami laporkan sebagaimana mestinya dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Semua kegiatan yang dapat kami pertanggungjawabkan tersebut telah kami cantumkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari(LPPN). Disna tertuang semua kemana saja dana yang telah kami gunakan selama satu tahun penuh.” (Andry Andres, jumat pukul 09.00 WIB tanggal 24 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Begitu ulasan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Nagari Talang Tengah. Bentuk pertanggungjawabannya adalah melalui hasil dari pelaporan anggran satu tahun penuh sebelumnya dan distu terlihat bagaimana pula kinerja pemerintahan nagarinya dalam satu berjalan. Pemerintah nagari dalam penyampaian hasil pelaporan kinerja pemerintahan Nagari tersebut juga mengevaluasi kinerja pemerintah nagari tersebut hanya dengan melihat dari hasil pelaporan akhir tahun saja.

e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

1) Peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana desa

Berikut hasil wawancara dengan Walinagari Talang Tengah: “Setiap program yang akan dikerja selalu dirapatkan, yang mana duluan yang diminta dengan melibatkan kepala Jorong, dan beberapa tokoh masyarakat. untuk pelaksanaan fisik, untuk sementara ini dalam mendukung transparansi kami rasa itu memang suatu keharusan untuk membuat baliho besar yang namanya transparansi

papan bicara. tetapi nagari talang tengah tidak dapat menepatkan dimana baliho atau papan bicara tersebut akan diletakkan agar masyarakat mudah untuk melihat seluruh informasi yang disampaikan dibaliho tersebut. Disamping itu adanya baliho tersebut, masyarakat juga bisa mengakses informasi itu melalui kantor Nagari. Ada memang hal-hal yang kita tidak publis secara umum seperti baliho misalnya kayak mengenai data-data penerima PKH, semua itu kita bisa akses, terbuka lebar untuk Nagari Talang Tengah. Tetapi karena kondisi kantor Walinagari kami masih kurang kondusif jadi masyarakat sepertinya kurang koefisien dalam mengakses informasi melalui papan informasi yang tidak dapat kami sediakan didepan kantor wali Nagari talang tengah. Mengapa demikian, karena tahun kemaren letak kantor kita masih di kediaman msyarakat yang begitu sangat ramai, tetapi sekarang karena kondisi lokasi kantor lama yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan maka lokasi kantor saat ini sulit untuk dijangkau msyarakat secara umum karna lokasinya bisa dikatakan diatas bukit. Tetapi kami tetap menyediakan baik papan maupun baliho mengenai informasi terkait pendanaan di Nagari kita ini jika gedung yang kami sudah memungkinkan untuk hal tersebut. gedung yang kami gunakan saat ini adalah gedung taman kanak-kanak yang sudah tidak terpakai lagi, sebelumnya kami menggunakan bangunan gedung KAN untuk kantor Wali Nagari, karena ada banyaknya kerusakan pada bangunan tersebut maka kami diharuskan untuk pindah ke Sekolah Taman Kanak-kanak ini. jadi pada intinya Nagari Talang tengah belum memiliki kantor Wali Nagari untuk saat ini.” (Andry Andres, jumat pukul 09.00 WIB tanggal 24 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Jadi dapat disimpulkan dari ulasan bapak walinagari Talang Tengah tersebut adalah bagi msyarakat umum yang ingin melihat dan menilai kinerja pemerintahan nagarinya maka mereka harus

meluangkan waktu khusus untuk hal tersebut. Karena lokasinya yang tidak strategis, dan tidak adanya papan informasi yang mereka sediakan untuk dilihat secara umum oleh masyarakat.

### **3. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Talang Tengah Tahun 2020**

Transparansi adalah nilai utama dari akuntabilitas, dimana individu atau organisasi dikatakan akuntabel apabila ia mampu menjelaskan atau menilai tindakan atau aksinya. Dengan demikian, individu atau organisasi yang akuntabel tidak dapat menyembunyikan kesalahan atau menghindarkan dirinya dari sebuah penyelidikan. Transparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk menilai kinerja organisasi, sebuah persyaratan kunci bagi semua dimensi akuntabilitas lainnya. Sebuah organisasi yang transparan menjamin akses kepada publik, pers, kelompok kepentingan, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan.

Transparansi juga mensyaratkan kebenaran informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan publik. Pertanyaan penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dari dimensi transparansi adalah: apakah organisasi mengungkapkan atau memberikan faktafakta terkait dengan kinerjanya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), Pemerintah Desa/Nagari dikatakan transparan apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

#### **a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.**

Menurut Bapak Wali Nagari Talang Tengah mengenai wujud transparansi Pemerintah Nagari Talang tengah terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja Nagari (APBNag). Tanggapan atau jawaban bapak wali Nagari terhadap wujud transparansi pengelolaan: “Pihak Nagari Talang Tengah telah memperlihatkan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat Nagari Talang Tengah pada saat rapat diberlangsungkan, karena sudah menjadi tanggungjawab dari pemerintah Nagari untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Masyarakat Nagari. Saya perwakilan yang akan menyampaikan

kepada BAMUS dan masyarakat Nagari melalui rapat tersebut. Akan tetapi, tidak semua masyarakat Nagari yang hadir dalam rapat tersebut hanya lembaga-lembaga masyarakat tertentu saja yang menghadirinya” (Andry Andres, jumat pukul 09.00 WIB tanggal 24 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berdasarkan jawaban dari bapak wali nagari yang penulis kutip, Nagari Talang Tengah telah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan-kebijakan anggaran yang diambil dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan anggaran tersebut. Rancangan APBNagari tersebut disusun terlebih dahulu berdasarkan usulan dari masyarakat Nagari pada saat pra musyawarah yang diadakan tiap-tiap jorong. Mengenai kegiatan pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap jorong. Kemudian disusun kembali rancangan APBNagari tersebut oleh pemerintah Nagari. Setelah APBNagari tersebut disusun kemudian dimusyawarahkan dengan BAMUS.

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Nagari Talang Tengah juga sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran yang dibuat setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh bendahara Nagari kepada Wali Nagari, setiap 3 bulan pembukuan tersebut ditutup dengan persetujuan Wali Nagari. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara dengan informan mengenai waktu pelaporan: “Laporan biasanya dibuat dalam satu tahun itu dua kali yang pertama dilaporkan paling lambat pada bulan Juli dan untuk laporan kedua dilaporkan oada akhir tahun anggaran berjalan paling lambat pada bulan januari sudah dilaporkan kepada Bupati Tanah datar. Tetapi dokumen ini tidak adanya tersedia untuk masyarakat umum untuk diperlihatkan dipapan pengumuman, karena saat ini keterbatasan perlengkapan kami untuk papan pengumuman khusus untuk dokumen yang sangat penting ini. dan juga karna baru pindah lokasi jadi masih banyak kekurangan perlengkapan yang



semestinya harus ada.” (Zulbaidar, jumat pukul 11.00 WIB tanggal 24 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari, nagari Talang Tengah belum memberikan/menyajikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) kepada masyarakat. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik dan kemudahan memberikan informasi-informasi yang akurat dan memadai kepada pihak yang membutuhkan informasi.

c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati Tanah Datar berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi (APBNag) yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi (APBNag) menurut hasil wawancara kepada Wali Nagari sudah dilaporkan, namun dengan keterbatasan akses-akses dokumen peneliti hanya mendapat dokumen mengenai Rancangan Anggaran Biaya saja. Kegiatan pelaporan untuk Nagari Talang Tengah digambarkan sebagai berikut, sesuai dengan hasil wawancara terhadap Wali Nagari: “laporan realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Wali Nagari terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli. Sedangkan untuk laporan realisasi untuk yang kedua sedang dalam proses pengerjaan saat ini. Biasanya Januari ini akan kami laporkan.” (Andry Andres, jumat pukul 09.00 WIB tanggal 24 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat

Berdasarkan jawaban dari Sekretaris Nagari Talang Tengah, bahwa: “Kami telah mendengarkan dan menerima semua pendapat masyarakat mengenai pembangunan dan kegiatan yang diusulkan dan dibutuhkan oleh masyarakat melalui lembaga unsur yang ada pada Nagari Talang Tengah yaitunya Kerapatan Adat Nagari(KAN), Lembaga Unsur Alim Ulama, Lembaga Unsur Cadiak Pandai, Lembaga Unsur Bundo Kandung, Lembaga Unsur Pemuda, Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK Nagari Talang Tengah. Semua unsur tersebut mengajukan suara rakyat agar tercapainya keberhasilan pembangunan nagari. Kami mengundang/melibatkan seluruh perwakilan lapisan masyarakat dan lembaga unsur saat Musrenbang.” (Zulbaidar, jumat pukul 11.00 WIB tanggal 24 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Talang Tengah, dalam melakukan perencanaan dan pembangunan yang ada di nagari telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui Lembaga Unsur dan tokoh-tokoh masyarakat. Perencanaan pembangunan yang telah disepakati saat Musrenbang nagari adalah keinginan masyarakat dengan memperhatikan seluruh usulan, kebutuhan dan harapan masyarakat Nagari Talang Tengah.

e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparan dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai ransparansi yang didapat dari hasil wawancara dengan sekretarsi Nagari Talang tengah: “Secara umum perangkat Nagari sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, setelah semua disepakati apa yang telah direncanakan dan disahlkan

maka kemasaja alokasi dana tersebut bisa diperlihatkan kemasyarakat yang ingin melihat laporan yang telah kami bukukan. Akan tetapi masyarakat itu sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja yang akan digunakan nantinya dan bersumber dari mana saja dana tersebut, yang penting dana cair dari pemerintah, begituma minset yang tertanam pada warga Nagari Talang Tengah pada umumnya.” (Zulbaidar, jumat pukul 11.00 WIB tanggal 24 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Talang Tengah)

Semua yang digambarkan oleh sekretaris Nagari Talang Tengah dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari talang tengah tidak dilakukan secara terbuka dan transparan, melainkan mereka hanya akan memberikan informasi tersebut kepada msyarakat jika ada diantara masyarakat tersebut yang mencari tahu dan mempertanyakan kemana saja dana tersebut disalurkan. Tetapi sejauh ini belum ada msyarakat yang terlalu dalam mengetahui alokasi dana tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu akuntabilitas pengelolaan APBNag yang dikelola oleh pemerintah Nagari Talang Tengah sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang melandasinya. Pemerintah Nagari Talang Tengah sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan, Pemerintah Nagari Talang tengah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati Tanah Datar. Akuntabilitas yang belum dilaksanakan pada pengelolaan APBNagari yaitu belum tersedianya tempat untuk papan informasi yang berguna bagi pemerintah Nagari sebagai bukti kepada masyarakat Nagari Talang Tengah dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Dengan tidak tersedianya sarana tersebut pemerintah Nagari tidak dapat menyampaikan informasi sebagaimana mestinya kepada masyarakat, masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi melalui papan informasi tersebut. Kondisi ini didukung karena minimnya tingkat keingintahuan mesyarakat mengenai alokasi dana yang dijalankan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah. Dan memberikan peluang bagi pemerintahan Nagari Talang Tengah untuk melakukan kecurangan.

Selanjutnya transparansi dalam pengelolaan APBNag juga sudah diterapkan di Nagari Talang Tengah. Namun masih ada beberapa yang belum menerapkan indikator dari kriteria transparansi. Pengumuman kebijakan anggaran belum dipublikasikan melalui baliho atau spanduk, tetapi laporan telah disajikan tepat waktu oleh pemerintah Nagari, yaitu paling lambat satu bulan setelah masa anggaran berakhir. selanjutnya pemerintah Nagari dalam penyusunan APBNagari dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat Nagari Talang Tengah. Untuk kedepannya, pemerintah Nagari akan membangun kantor Walinagari yang memadai dan menyediakan berbagai

tempat informasi agar transparansi pengelolaan APB Nagari mudah diakses masyarakat Nagari.

Proses pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah sudah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, dan dengan menggunakan acuan yang diberikan oleh pihak kecamatan dalam penyusunannya, tetapi dalam penyusunannya pemerintah Nagari Talang Tengah tidak melakukan secara Transparan dikarenakan tidak diketahui secara langsung prosesnya oleh masyarakat umum. Masyarakat baru akan mengetahui jika proses tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu, dan telah selesainya laporan penyelenggaraan dana tersebut dibuat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan masukan, saran tersebut antara lain:

1. Saran untuk pemerintah Nagari Talang Tengah, dalam mempublikasikan laporan pertanggungjawaban melalui media papan informasi yang memadai segera dilakukan.
2. Pemerintah Nagari Talang Tengah perlu membangun bangunan atau gedung untuk kantor pemerintahan Nagari Talang Tengah, dikarenakan. Sampai saat inipun Nagari Talang Tengah belum memiliki gedungnya sendiri dan fasilitas untuk meletakkan papan informasi mengenai seluruh kegiatan Nagari.
3. Fokus terhadap masyarakat sebagai subjek penggunaan Alokasi Dana Desa (Nagari). Pemerintah Nagari diharapkan lebih transparan lagi terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Nagari seperti, memasang anggaran pengeluaran dan pemasukan untuk pembangunan desa ke papan pengumuman atau papan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andy Ramadhan Irawan, MG. Wi. Endang NP, Zahroh ZA. (2015). *Sistem Akuntansi Keuangan Desa* :Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 22 No. 1: 2.
- Anisa Nur, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Volume 10 (2), Oktober
- Bupati Tanah Datar. (2016). Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari*.
- Dwiyanto,A. 2002, *Reformasi Birokrasi di Indonesia*, PSKK-UGM, Yogyakarta.
- Faridah &Suryono Bambang, (2015). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintahdesa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4, No 5.
- Hanifa Suci Indah, 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Vol. 4 No. 8
- Hidayat, Misbah.L. 2007. *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Juliana Pipit, 2017. *Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*. Vol. 6 No. 2 Hlmn. 169-183 Madiun, Oktober
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf>
- Ledvina, V.C. 1991. *Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concept*. Asian Review of Public Administration Vol.III.
- Leonardo yosua L., Linda L., Heince R. (2017). *Anlisis pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kolongan*

- Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA. Vol. 5 No. 2 Hal. 1474-1483.*
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPPSTIM YKPN: Yogyakarta
- Marchelino Daling, 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja. Jurnal Emba 83 Vol.1 No.3 September 2013, hal. 82-89.*  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/1942/1539> di akses 8/04/2017
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset.
- Moleong, L.J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2012) *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ngakil Ibnu, 2020. *Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. Vol. 3, No. 2, Agustus
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Oliver, Richard W. 2004. *What is Transparency*, Published by McGraw-Hill Professional Rowan, J. dan Pandlebury, M. 1996. *Public Sector Accounting*, London: Pitman Publishing.
- Pratikno. 2000. *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa, dalam Dadang Juliantara. Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta: Lappera.
- Rizal, 2016. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 14 Volume I

- Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Demokrasi Hak Azasi Manusiadan Masyarakat*, Jakarta
- Smith, Rex Deighton. 2004. *Regulatory Transparency in OECD Countries: Overview, Trends a,d Challenges*. Australian: Journal of Public Administration
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan. PT. Toko Gunung Agung*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Santoso Urip, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.4, No.1: hal. 14–33, (ISSN:0216–1249)
- Sari Retno Murni, 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bandosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Komplek Vol. 7 No. 2 Desember
- Supheni Indrian, 2016. *Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Desa (APBDes)*. EKSIS Vol XI No 2, 2016
- Utomo Slamet Joko, 2015. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa*. Media Trend Vol. 10 No. 1 Maret 2015, hal. 19-31



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kora Batusangkar 72213. Telp: (0752) 71150. Ext: 135. Fax: (0752) 71879.  
Website: [www.iainatusangkar.ac.id](http://www.iainatusangkar.ac.id) e-mail: [ipm@iainatusangkar.ac.id](mailto:ipm@iainatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 0596/n.27/L/TL.00/07/2021 14 Juli 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar  
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar  
Batusangkar

Assalamu 'alaikum W. Wb.  
Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Dike Nastiti Wahyuni / 1730403021  
Tempat/Tanggal Lahir : Gurun, 22 Juni 1998  
Kartu Identitas : KTP- 1304096206980003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Alamat : Jorong Gurun Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab  
Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) Nagari Talang Tengah Tahun 2020**  
Lokasi : Kantor Wali Nagari Talang Tengah  
Waktu : 15 Juli 2021 s.d 15 September 2021  
Dosen Pembimbing 1 : Sri Adalia Fitri, SE., M.Si.  
2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dr. H. Muhammad Fazis, M. Pd

**Tembusan**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)**

Jl. Raya Batusangkar - Bukit Tinggi Simpang Utama Jorong Simpulang Kec. Sungai Tarab

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI  
Nomor : 070/476/KESBANGPOL/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-0596/In.27/LI/TL.00/07/2021 tanggal 14 Februari 2021 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: DIKE NASTITI WAHYUNI
Tempat/Tgl. Lahir	: Gurun, 22 Juni 1998
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Gurun Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab
Kartu Identitas	: ICTP.1304086206980003
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (ABPN) NAGARI TALANG TANGAH TAHUN 2020"
Lokasi Penelitian	: Kantor Wali Nagari Talang Tangah
Waktu	: 21 Juli 2021 s.d 15 September 2021
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan izin kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 21 Juli 2021 s.d 15 September 2021.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Batusangkar, 21 Juli 2021

AN KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KASI KEKAWAHLAN BANGSA,

  
**GUSMAWATI, SH**  
 NIP. 19700017 199308 2 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Danlats ODB Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapadwis Tanah Datar di Batusangkar
4. Dinas PMD/PEB Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Camat Sungai Tarab di Sungai Tarab
6. Wali Nagari Talang Tangah di Talang Tangah
7. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
8. Yang bersangkutan.

 **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**KECAMATAN SUNGAI TARAB**  
**WALI NAGARI TALANG TANGAH**  
Jalan Raya Talang Tengah – Batusangkar Km 8. Kode pos 27261

---

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 1402/ /Kesra-2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ANDRY ANDRES  
Jabatan : WALI NAGARI TALANG TANGAH

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DIKE NASTITI WAHYUNI  
NIK : 1304086206980003  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl. Lahir : Gurun/ 22 Juni 1998  
Alamat : Jorong Gurun Nagari Gurun

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian untuk keperluan skripsi di Nagari Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab terhitung Tanggal 26 Juli 2021 dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ( APBN ) Nagari Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020”.

Demikianlah surat keterangan melakukan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan bagi yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Talang Tengah, 30 Agustus 2021  
WALI NAGARI TALANG TANGAH  
  
ANDRY-ANDRES

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) Nagari Talang Tengah  
 Informan : Walinagari Talang Tengah  
 Tanggal : 26 Juli 2021  
 Waktu : 14.00 WIB  
 Tempat : Kantor Walinagari Talang Tengah

1. Pengelolaan APBN Nagari Talang Tengah
  - Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan nagari talang tengah?
  - Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana nagari?
  - Bagaimana penatausahaan pengelolaan alokasi dana Nagari Talang Tengah?
  - Kegiatan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah?
2. Akuntabilitas APBN Nagari Talang Tengah
  - a. Menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.
    - Bagaimana Pelaporan atau penyajian realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah
    - Apa saja Bentuk laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Nagari Talang Tengah
    - Apa saja Kesulitan dari pemerintah Nagari dalam membuat pertanggungjawaban administrasi
    - Bagaimana proses waktu penyampaian informasi laporan pertanggung jawaban
  - b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
    - Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Nagari Talang Tengah kepada masyarakat
  - c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
    - Masyarakat yang ikut menghadiri dalam permusyawaratan pelaksanaan pembangunan Nagari
    - bagaimana cara pemerintah Nagari menanggapi dan mengkoordinir segala masukan dari peserta musyawarah
  - d. mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
    - Semua yang direncanakan sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan program dana Nagari

- Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Nagari Talang Tengah
- e. Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah
- Peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepadamasyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana desa
3. Transparansi APBN Nagari Talang Tengah
- bagaimana pengumuman kebijakan yang dilakukan pemerintah nagari
  - apakah sudah tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat
  - apakah tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
  - apakah sudah terkomodasinya suara/usulan rakyat
  - Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Talang Tengah, 26 Juli 2021  
Wakil Nagari Talang Tengah  
Andry Andres



### Pedoman Wawancara Penelitian

Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) Nagari Talang Tengah  
 Informan : Sekretaris Nagari Talang Tengah  
 Tanggal : 26 Juli 2021  
 Waktu : 14.00 WIB  
 Tempat : Kantor Walinagari Talang Tengah

1. Pengelolaan APBN Nagari Talang Tengah
  - Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan nagari talang tengah?
  - Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana nagari?
  - Bagaimana penatausahaan pengelolaan alokasi dana Nagari Talang Tengah?
  - Kegiatan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah?
2. Akuntabilitas APBN Nagari Talang Tengah
  - a. Menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.
    - Bagaimana Pelaporan atau penyajian realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah
    - Apa saja Bentuk laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Nagari Talang Tengah
    - Apa saja Kesulitan dari pemerintah Nagari dalam membuat pertanggungjawaban administrasi
    - Bagaimana proses waktu penyampaian informasi laporan pertanggung jawaban
  - b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
    - Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Nagari Talang Tengah kepada masyarakat
  - c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
    - Masyarakat yang ikut menghadiri dalam permusyawaratan pelaksanaan pembangunan Nagari
    - bagaimana cara pemerintah Nagari menanggapi dan mengkoordinir segala masukan dari peserta musyawarah

- d. mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
    - Semua yang direncanakan sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan program dana Nagari
    - Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Nagari Talang Tengah
  - e. Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah
    - Peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepadamasyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana desa
3. transparansi APBN Nagari Talang Tengah
- bagaimana pengumuman kebijakan yang dilakukan pemerintah nagari
  - apakah sudah tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat
  - apakah tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
  - apakah sudah terakomodasinya suara/usulan rakyat
  - Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Talang Tengah, 26 Juli 2021

Sekretaris Nagari Talang Tengah





Pedoman Wawancara Penelitian

Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) Nagari Talang Tengah  
 Informan : Bendahara Nagari Talang Tengah  
 Tanggal : 26 Juli 2021  
 Waktu : 14.00 WIB  
 Tempat : Kantor Walinagari Talang Tengah

1. Pengelolaan APBN Nagari Talang Tengah
  - Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan nagari talang tengah?
  - Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana nagari?
  - Bagaimana penatausahaan pengelolaan alokasi dana Nagari Talang Tengah?
  - Kegiatan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah?
2. Akuntabilitas APBN Nagari Talang Tengah
  - a. Menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.
    - Bagaimana Pelaporan atau penyajian realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Talang Tengah sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah
    - Apa saja Bentuk laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Nagari Talang Tengah
    - Apa saja Kesulitan dari pemerintah Nagari dalam membuat pertanggungjawaban administrasi
    - Bagaimana proses waktu penyampaian informasi laporan pertanggung jawaban
  - b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
    - Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Nagari Talang Tengah kepada masyarakat
  - c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
    - Masyarakat yang ikut menghadiri dalam permusyawaratan pelaksanaan pembangunan Nagari
    - bagaimana cara pemerintah Nagari menanggapi dan mengkoordinir segala masukan dari peserta musyawarah
  - d. mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
    - Semua yang direncanakan sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan program dana Nagari

- Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Nagari Talang Tengah
- e. Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah
- Peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepadamasyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana desa
3. transparansi APBN Nagari Talang Tengah
- bagaimana pengumuman kebijakan yang dilakukan pemerintah nagari
  - apakah sudah tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat
  - apakah tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
  - apakah sudah terakomodasinya suara/usulan rakyat
  - Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Talang Tengah, 26 Juli 2021

Kaur Keuangan Nagari Talang Tengah



Darmawenita

LAPORAN REALISASI APS DESA  
 PEMERINTAH NAGARI TALANG TANGAH  
 KECAMATAN SUNGAI TARAB  
 KABUPATEN TANAH DATAR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Transfer	1.467.397.793,00	1.332.819.965,00	134.577.828,00
Dana Negara	803.775.000,00	698.332.420,00	115.442.580,00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab	37.789.793,00	18.654.545,00	19.135.248,00
Alokasi Dana Negara	625.833.000,00	625.833.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	1.690.358,00	1.690.358,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.467.397.793,00</b>	<b>1.334.480.323,00</b>	<b>132.917.470,00</b>
<b>BELANJA</b>			
BORNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	906.910.557,00	906.122.400,00	32.788.087,00
BORNG PELAKSANAAN PEMBAYUNAN NAGARI	476.550.970,00	433.820.560,00	42.730.410,00
BORNG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	198.474.210,00	196.349.250,00	12.124.960,00
BORNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	54.974.750,00	54.854.400,00	120.350,00
BORNG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEMERDEKAAN NAGARI	315.988.500,00	242.968.000,00	73.020.500,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.844.903.967,00</b>	<b>1.484.114.660,00</b>	<b>160.789.307,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(177.506.174,00)</b>	<b>(149.634.337,00)</b>	<b>(27.871.837,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Pendapatan Pembiayaan	177.506.174,00	177.506.174,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>177.506.174,00</b>	<b>177.506.174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SELISIR TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>27.871.837,00</b>	<b>(27.871.837,00)</b>

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

TALANG TANGAH, 07 Januari 2021  
 WALI NAGAR  
  
 ANDRI ANDRES

REKAPITULASI PERENCANAAN BUDGET  
 RENCANA TAHUNAN TERPADU (RAPT) TAHUN 2019  
 KEMENTERIAN PERKULIAHAN, KEMAHasiswaAN DAN  
 KEMASYARAKATAN

NO. KEMAHASISWAAN : 0205/0001/0001/1  
 BUDGET

No	Tipe	Kategori	Keterangan	Kategori	Perencanaan		Perencanaan	Perencanaan	Kategori	Kategori	Kategori
					Saldo	Saldo					
1	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
2	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019
3	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019

Membina  
 dan meningkatkan mutu  
 pendidikan

Tinggi Rendah  
 dan Rendah

10/01/2019

RKAS 420 PRODUKSI BAKU  
 BUKAN TERANG TERANG EKSPANSI/RESTRUKTURISASI  
 (Masa Berlaku 2020-2021)

No. Revisi : 0001/2021/000001  
 Bulan : Maret

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Kode Transaksi	Perkiraan	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	01/01/2020	Saldo awal		Saluran	108.814.174	208.148	31.624.882			477.794.421
	02/01/2020	Temp. Temp. Sisa Sisa (sisa) (sisa) (sisa) (sisa)		Saluran			1.921.000.000			64.826.882
	14/01/2020	Transfer dana KCM / Monev		Saluran	112.275.792		67.282.500			279.202.573
	24/01/2020	Temp. Sisa Sisa KCM		Saluran			50.208.200			285.519.873
	24/01/2020	Temp. Sisa Sisa KCM		Saluran			222.822.800			427.452.873
	11/01/2020	Transfer dana APBN (tahap 1)		Saluran			86.370			427.452.873
	11/01/2020	Saldo akhir bulan Maret		Saluran	438.648.526	86.370	108.814.174			427.452.873
	31/01/2020	Transfer Saldo ke		Saluran	678.972.724	173.418	242.849.790			427.452.873
		Transfer Saldo ke		Saluran						
		Transfer Saldo ke		Saluran						

Monev  
 Widi Nugraha Satrio Nugraha

Keddy Andri

Temp. Revisi, 31 Maret 2020  
 Kasir Keuangan

Sapriawati

REKAPITULASI TRANSAKSI BANK  
 MUCALAI TABUNG TANJUNG RECOMBINATION SYDNEY TERASA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No Rekapitulasi : 0002/0101/000003  
 Bulan : APRIL

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Saldo Transaksi	Penarikan		Pengeluaran		Saldo	No
				Saluran	Bunga Bank	Pendapatan	Pajak		
	01/04/2020	Saldo Awal		671.922.714	175.413	247.148.720		427.408.642	
	03/04/2020	Trans transfer dana KPRN 412 527 200 400 11 10 000 1		57.211.250		154.207.409		504.501.742	
	08/04/2020	Transfer Bakti dana KPRN Nidani April				80.633.966		208.668.297	
	09/04/2020	Trans transfer dana KPRN dana ABRN				18.500.000		213.168.297	
	20/04/2020	Trans transfer dana KPRN				10.000.000		203.168.297	
	22/04/2020	Trans transfer dana KPRN						203.168.297	
	30/04/2020	Jumlah dari buku April		57.211.250	215.699	201.541.405			
		Transaksi bulan ini		772.148.974	981.117	520.397.100			203.168.297
		Transaksi komparatif							

Masyarakat  
 Wali Nagari Tabung Tengah  
 Andy Anansi

Tanjung Tengah, 30 April 2020  
 Kapur Keutungan  
 Dermajayenta

REKAPITULASI PERUBAHAN SALDO PERBANKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No. rekening : 0800.0101.00099.9  
 Bulan : Mei

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Saldo Terdahulu	Perubahan		Penghasilan		Saldo	Rp
				Setoran	Bergaji Bank	Penarikan	Pajak		
	01/05/2020	Saldo Awal	07.201.127	732.183.674	98.117	525.971.100		201.961.991	
	05/05/2020	Tran transfer dana APBN		57.211.250		33.818.000		235.344.241	
	11/05/2020	Transfer Bank dana AON U/12 Bulan MW				31.424.500		199.715.941	
	12/05/2020	Tran tunai dana AON				27.600.000		178.221.941	
	16/05/2020	Tran tunai dana AON (BLT)		139.566.850	103.000			146.787.991	
	20/05/2020	Transfer Bank Dana AON 15%						146.787.991	
	31/05/2020	Jasa giro bulan Mei						146.787.991	
		Transfer bulat Mei		171.277.500	162.869	134.353.000		248.975.840	
		Transaksi Kompletif		909.961.874	759.186	669.755.000			

Materi bulat  
 Wakil Menteri Bidang Tengah

Andry Andres

Tiang Tengah, 31 Mei 2020  
 Staf Keuangan

Darmawanta

DAFTAR RENCANA PEMBAYARAN PERANGKAT ALAT  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No rekening : 2202.2021.001011 9  
 Akun : 2.202

No	Tanggal Tersedia	Uraian Tersedia	Kategori Tersedia	Persediaan Saluran	Bunga Bank	Proyeksi Pajak	Penghasilan Pajak	Saldo Ny
	01/06/2020	Saluran bank		829.861.414	741.248	863.755.000		246.000.000
	01/06/2020	Transf. Transf. danu APBN (Luar)				11.648.000		220.000.000
	01/06/2020	Transf. Transf. danu APBN (Peng. Svy. danu Bank)				41.204.500		355.500.100
	01/06/2020	Transfer danu APBN LRA		120.000.700				524.500.200
	12/06/2020	Transfer danu APBN LRA		51.211.200				862.044.500
	15/06/2020	Transf. Transf. danu APBN (Luar)						299.900.500
	15/06/2020	Transf. Transf. danu APBN (Luar)						260.000.000
	16/06/2020	Transf. Transf. danu APBN						441.821.500
	18/06/2020	Transf. Transf. danu APBN (Luar) (Transfer danu APBN)						260.000.000
	22/06/2020	Transf. Transf. danu APBN (Luar) (Luar APBN)						441.821.500
	23/06/2020	Transfer danu APBN LRA		80.377.500				467.000.000
	30/06/2020	Saluran bank		1.108.118.418	1.008.894	861.170.500		127.000.000

Masripilji  
 Wakil Bupati Tegal, Tegal

Tegal, Tegal, 10 Juni 2020  
 Kapur Kuningan  
 Gumpunya



KANTOR WALI NEGARA KABUPATEN SINGAJI TANGGA  
TANGGA ANGGARAN 2020

No Rekening : 0300.0101.0030115  
Bulan : SEPTEMBER

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Saldo Transaksi	Pergerakan			Pengeluaran Total	Asesmentasi	Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan			
	01/01/2020	Saldo Awal		1.214.458.557	1.401.372	1.133.632.890		109.424.295	
	01/09/2020	Transk transfer dana AOD BLT tahap 2/ Juli				32.790.000		76.634.295	
	07/09/2020	Transfer bank AOD bulan Agustus		46.343.083				128.977.378	
	08/09/2020	Transk tunai dana AOD siswa/tunjangan september				28.377.000		100.600.378	
	17/09/2020	Transk tunai dana AOD siswa/tunjangan september				46.098.100		54.502.278	
	21/09/2020	Transfer Bank dana AOD bulan September		46.343.083	64.145			100.846.393	
	30/09/2020	Jasa Giro bulan September		92.696.166	64.145	101.575.100		8.211.293	
		Transaksi bulan ini		1.307.145.723	1.465.517	1,230,207,940		88.403.296	
		Transaksi komulatif						88.403.296	

Menyetujui:  
Wali Negara Tangga  
Andy Andrie

Tanggal Tangga, 30 September 2020  
Kantor Keuangan  
Darmawansa

TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Perkiraan		Pengeluaran		Saldo Rp
				Saldo Awal	Biaya Bank	Perubahan	Real	
	01/08/2020	Saldo Awal		1.214.452.557	1.278.153	891.105.800		822.841.850
	03/08/2020	Tran. tunai dari SIM Antiprancisjangan Agung				28.727.000		291.568.850
	05/08/2020	Tran. tunai dari AGD (BTT I, II, III)			150.000.000			443.568.850
	07/08/2020	Tran. tunai dari AOH, Jilpa AOH, AGD			30.000.000			473.568.850
	19/08/2020	Tran. tunai dari AVPM			50.000.000			523.568.850
	31/08/2020	Jasa Giro bulan Agustus						523.568.850
		Transaksi bulan ini			123.259	115.577.200		523.568.850
		Transaksi kumulatif		1.214.452.557	1.401.872	1.117.682.000	0	523.568.850

Menyetujui:  
Wali Nagari Tanjung Tengah

Andry Andris

Tanjung Tengah, 31 Agustus 2020  
Kaur Keuangan

Darmawanta

KABUPATEN TALANG TANGAH  
TALANG TANGAH  
TALANG TANGAH

No Rekening : 0200 0101 0200 01  
Bulan : SEPTEMBER

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Fenomena			Pembelian	Pengeluaran	Pajak	Aset/Liabilitas	Saldo
				Setoran	Biaya Bank	Penerimaan					
	01/01/2020	Saldo Awal		1.214.455.557	1.401.372	1.112.612.250	32.790.000				508.228.079
	01/09/2020	Tarik tunai dana AOD BLT tahap 2/ Juli									79.528.019
	07/09/2020	Transfer bank AON bulan Agustus		46.343.093							128.871.843
	08/09/2020	Tarik tunai dana AON sisisi/tunjangan september				28.377.000					88.494.843
	17/09/2020	Tarik tunai dana AON sisisi/tunjangan september				46.698.100					41.796.743
	21/09/2020	Transfer Bank dana AON bulan September		46.343.093							88.153.650
	30/09/2020	Jasa giro bulan September			64.145						88.153.650
		Transaksi bulan ini		92.696.166	64.145	107.575.100					88.403.290
		Transaksi komulatif		1.307.145.723	1.465.517	1.220.207.950					88.403.290

Menyetujui:  
Wakil Bupati Talang Tangah

Andy Andrie

Talang Tangah, 30 September 2020  
Kaur Keuangan

Darmawati

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Buku Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran		Saldo Rp
				Sektor	Bunga Bank	Pengeluaran	Tarif	
		Saldo Awal		1.394.478.416	1.534.412	1.375.506.500	28.377.000	91.571.916
	02/11/2020	Tanah tana ADN/ ulitap tuju November		46.343.083				138.872.427
	12/11/2020	Transfer Bank dana ADN/ bulan November						133.817.946
	12/11/2020	Tan tunai dana ADN / ulitap ADN		8.672.945				111.548.684
	17/11/2020	Transfer Bank Dana DBH/Ret terbufer dari II				71.462.900		115.189.584
	20/11/2020	Tan tunai ADN/ DBH/Ret I, II dan ulitap ADN		3.811.790				
	20/11/2020	Sektor Sisa kas tunai belanja DD 2020 I/D OK 3367.150						
		Sip DD 19		70.500				
		Sip OK 19		172.700				
		Sip DBH/Ret 19		106.100				
		Sip DBH/Ret kgsalur 18		75.140				
		Sip DBH/Ret kgsalur 18		91.306				
		Sip DBH/Ret kgsalur 18		91.306		36.176.500		118.271.982
	30/11/2020	Jilisa Giro bulan November		58.827.818				
		Transaksi bulan ini		1.451.305.244	1.025.718	1.411.281.000		
		Transaksi kumulatif						155.271.982

Mentor/Supervisor:  
Wali Kagar/ Taklim Taklim

Andy Andras

Tanggal Tanggal: 30 November 2020  
Kaur Keuangan

Darmawati

REKAPITULASI SALDO AKHIR PER 30 NOVEMBER 2020  
KANTOR WILAYAH KOTA TANGERANG  
KANTOR KEMENTERIAN KEUANGAN RI

No Rekapitulasi: 0001/0001/0001/20  
B/2020

